

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Gambaran umum penelitian menjelaskan secara spesifik objek penelitian, lebih lanjut untuk mengetahui potensi, situasi dan kondisi strategis yang sedang berkembang pada objek penelitian yang sedang diteliti. Gambaran umum penelitian berisi informasi tentang objek penelitian pada penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kondisi ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang.

4.1.1 Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir di Wilayah Perbatasan Sabang

Sabang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata yang paling digandrungi di wilayah Aceh. Sabang tidak memiliki peningkatan maritime income yang tajam jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Aceh, sehingga perlu upaya dan sinergi yang serius guna mengoptimalkan semua potensi yang ada. Jika perlu, dimasukkan ke dalam objek prioritas wisata bahari nasional. Meskipun begitu, secara general Sabang memiliki jumlah penduduk miskin terkecil di Provinsi Aceh, yakni 5,43% dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ke-tiga menurut Data BPS Tahun 2020.

Masyarakat Aceh juga sangat menghargai hukum adat laot yang ada di wilayahnya. Tidak ada kebudayaan atau kebiasaan local yang bisa merusak lingkungan, baik secara sengaja atau tidak. Justru nilai-nilai local yang berkembang di masyarakat, secara adat budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan Panglima Laot dan pemerintah berusaha untuk mengalihkan alat tangkap berbahaya ke alat-alat yang lebih ramah lingkungan, serta mengatur jadwal tangkap yang sesuai dengan masa hidup ikan. Keberadaan Panglima Laot di Sabang

merupakan salah satu aset berharga karena pengaruh hukum adat yang masih kental jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Aceh (Kurniawan, 2008).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 menyebutkan, bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Perbatasan sebuah negara (*state's border*) dapat dipandang dalam konsep batas negara sebagai sebuah ruang geografis (*geographical space*) dan atau batas negara sebagai ruang sosial budaya (*sosial culture space*). Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, dan hukum nasional serta internasional (Moeldoko, 2012).

Karakteristik kawasan perbatasan ada tujuh macam yaitu karakteristik fisik garis batas di darat dan laut belum jelas dan pasti, pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat, garis batas di laut ditentukan oleh keberadaan pulau-pulau terluar yang terpencil. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau dan perlu dilindungi. Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas, jumlah Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB) masih terbatas.

Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum laut internasional yang diatur dalam konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985.

Indonesia berbatasan laut dengan India tepatnya di laut Andaman, Samudera Hindia dan perairan pulau Nikobar, perbatasan kedua negara ini terletak di pulau Rondo yang merupakan cakupan wilayah administrasi Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut hasil identifikasi pulau-pulau serta hasil survei titik dasar Dinas Hidrografi dan Oseanografi (DISHIDROS) TNI AL terdapat 17.508 pulau di Indonesia yang terletak di 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 12 pulau diantaranya perlu mendapatkan perhatian khusus salah satunya adalah pulau Rondo yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan India.

Posisi Sabang yang berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Thailand dan India menjadikan rentan terhadap terjadinya permasalahan keamanan maritim seperti ilegal fishing, masuknya imigran gelap, perubahan iklim, perusakan ekosistem, penyelundupan dan pengedaran narkoba, hal ini berdampak kepada masyarakat pesisir sebagai objek yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Sabang ini, sehingga masyarakat diharapkan akan dapat mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri pribadi. Selanjutnya dalam proses ini komunitas mampu mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Keberhasilan melawan rintangan digunakan untuk menangkap makna ketahanan, sehingga ketahanan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

4.1.2 Implementasi Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

Staf Umum Potensi Maritim TNI Angkatan Laut (Spotmar TNI AL) adalah Staf Umum pembantu pimpinan di tingkat Markas besar Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut.

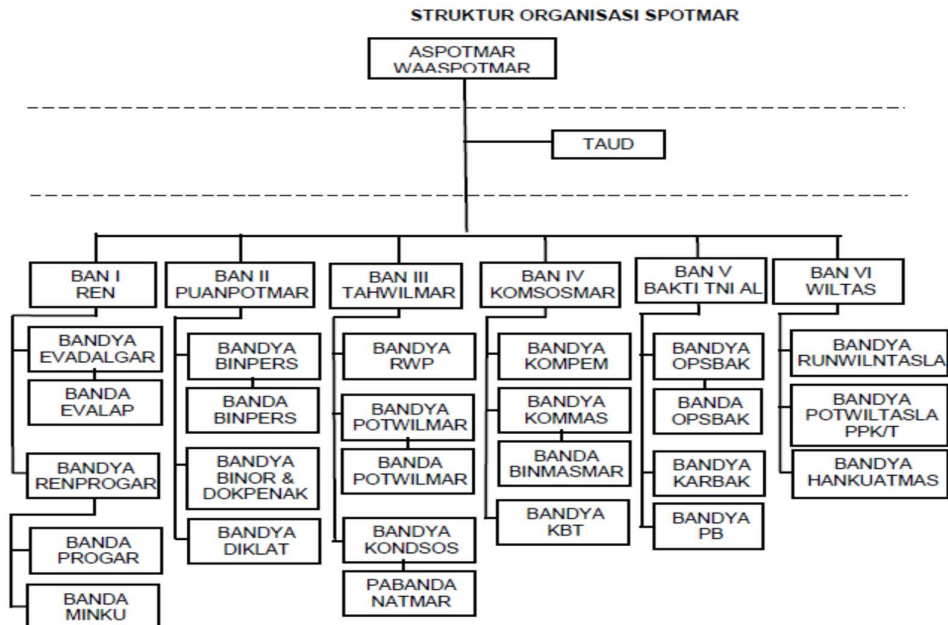
Spotmar sebagai fungsi teritorial dengan melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap jajaran Staf Komando Utama (Kotama), Komando Pelaksana Utama (Kolaktama) sedangkan pada tingkat pelaksanaannya mulai dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) sampai dengan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) di daerah.

Spotmar bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Laut di bidang Binpotmar dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) guna menyiapkan Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, Spotmar menyelenggarakan fungsi-fungsi sesuai bagiannya yaitu:

- a. Bidang Perencanaan
- b. Bidang pembinaan kemampuan potensi maritim
- c. Bidang Pembinaan ketahanan wilayah maritim
- d. Bidang pembinaan komunikasi sosial maritim
- e. Bidang pembinaan bakti TNI Angkatan Laut
- f. Bidang pembinaan wilayah perbatasan laut

Pembentukan Spotmar TNI AL berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 9 September 2016, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Spotmar TNI AL

Sumber: Jukker Spotmar TNI AL, 2021

Terkait dengan Program Spotmar TNI AL dengan beberapa program unggulannya yaitu dibidang Pembinaan kemampuan Potensi Maritim (Binpuanpotmar) dengan program penataran kemampuan potensi maritim kepada prajurit TNI AL, kemudian dibidang komunikasi sosial maritim (Komsosmar) dengan program komunikasi sosial dengan komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut, selanjutnya adalah bidang pembinaan ketahanan wilayah maritim (Bintahwilmar), bidang bakti TNI AL dengan program bersih pantai dalam rangka hari dharma samudera dan bidang pembinaan wilayah pertahanan laut (Binwiltasla) dengan program peningkatan wawasan kebangsaan di wilayah kerja Lanal Sabang terkait dengan penguatan dan pemberdayaan wilayah. Program ini dimaksudkan guna menyiapkan Ruang Alat dan

Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

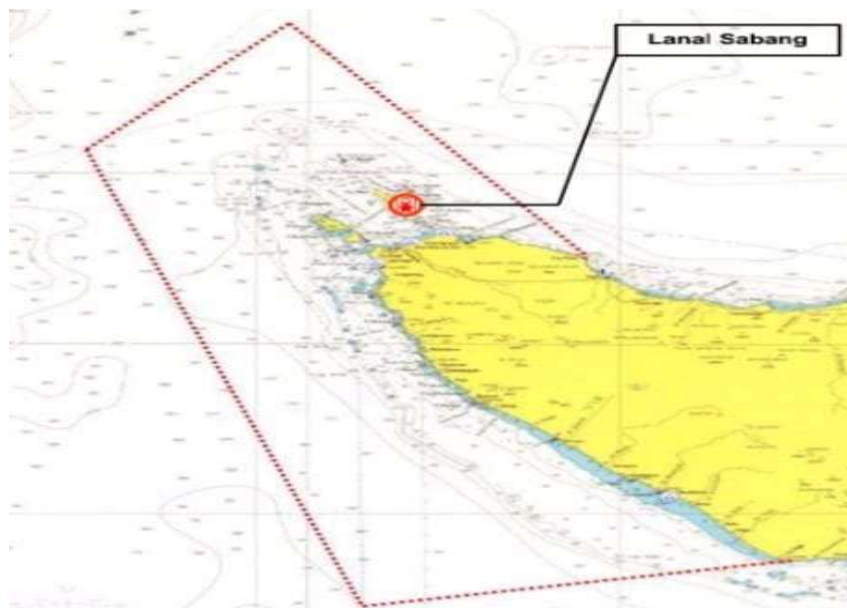
Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang disingkat Lanal Sabang adalah Komando Pelaksana Dukungan (Kolakduk) yang berkedudukan langsung di bawah Danlantamal I. Lanal Sabang bertugas menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, pembinaan potensi Nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim, pemberdayaan Daerah Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) serta tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan Kasal, Operasi Keamanan Laut Terbatas di Wilayah kerja Lanal Sabang dan jajarannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lanal Sabang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi penyelenggaraan dukungan logistik dan administrasi
2. Fungsi Penyelenggaraan Kamla
3. Fungsi penyelenggaraan Binpotnaskuatmar
4. Fungsi Pemberdayaan Dawilhanla:

Wilayah kerja Lanal Sabang meliputi sepanjang pantai Barat Sumatera Provinsi Aceh yang meliputi, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kodya Banda Aceh sampai dengan Pulau Weh (Kodya Sabang). Dengan batas sebelah Utara merupakan ujung Pulau Weh berbatasan dengan Kepulauan Andaman & Nikobar serta Laut Andaman $10^{\circ} 20' 80''$ LU - $91^{\circ} 00' 85''$, batas sebelah Timur adalah wilayah kerja Lanal Lhokseumawe (Kab. Pidie) $04^{\circ} 30' - 04^{\circ} 60'$ LU $95^{\circ} 75' - 96^{\circ} 20'$ BT dan Selat Malaka yang merupakan perbatasan dengan Thailand & Malaysia $07^{\circ} 20' 00''$ LU - $96^{\circ} 19' 00''$ BT dengan panjang pantai ± 245 mil laut, batas sebelah Selatan adalah Wilayah kerja Lantamal I/Lanal Simeulue yang berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya $04^{\circ} 10' 00''$ LU - $96^{\circ} 30' 00''$ BT, batas sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia yang berbatasan langsung

dengan wilayah kerja Lanal Simeulue (Pulau Simeulue) $03^{\circ} 44' 00''$ LU - $92^{\circ} 10' 00''$ BT. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar peta wilayah kerja Lanal Sabang berikut ini:



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kerja Lanal Sabang

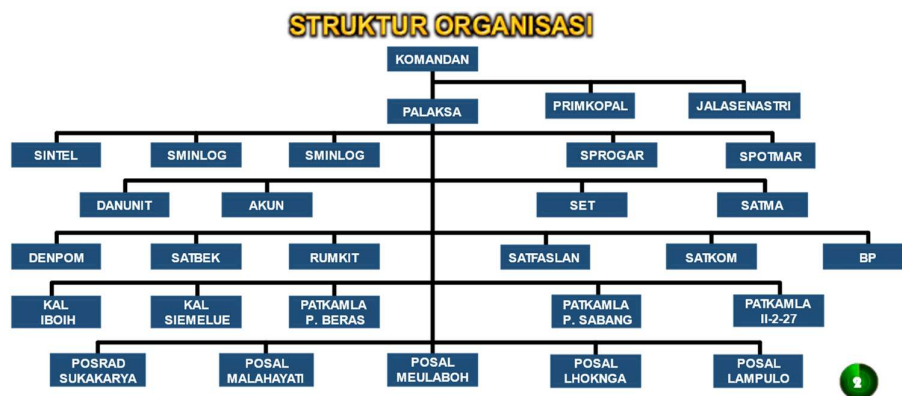
Sumber: Laporan Triwulan Lanal Sabang 2021

Berdasarkan peta wilayah kerja Lanal Sabang diatas dapat dilihat bahwa posisi Sabang yang berbatasan dengan tiga negara yaitu India di kepulauan Nikobar kemudian negara Malaysia dan Thailand dan Lanal Sabang dihadapkan pada wilayah kerja yang relatif luas dengan banyaknya ancaman yang memungkinkan terjadi di wilayah ini. Keberadaan lima Pos TNI AL (Posal) yang mendukung tugas Lanal Sabang dengan keterbatasan kemampuan Alutsista yaitu :

- a. Posal Sukakarya yang memiliki Legend: AIS, Radar, LRC
- b. Posal Lampulo yang memiliki PAT I.132/P Bunta (Sea Raider)
- c. Posal Malahayati yang memiliki 1 unit Rubber boat
- d. Poasal Lhoknga memiliki 1 unit speed Fiberglass

- e. Posal Posal Meulaboh yang memiliki 1 unit Speed boat 6 M dan 1 unit perahu karet

Kedudukan dan tanggung jawab Komandan Lanal Sabang adalah pembantu dan pelaksana Danlantamal I, dalam menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi, pembinaan potensi Nasional menjadi kekuatan pertahanan di bidang maritim, pembinaan teritorial matra laut dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Danlanal Sabang bertanggung jawab kepada Danlantamal I. Adapun struktur organisasi Lanal Sabang adalah sebagai berikut:



Bagan 4.2 Struktur Organisasi

Sumber: Jukker Lanal Sabang 2021

4.1.3 Konsep untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

Pada penelitian ini peneliti mengkaji secara mendalam tentang perkembangan konsep *helix* dalam sebagai konsep dalam percepatan

peningkatan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan. Pemahaman konsep ini dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan inovasi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang melibatkan aktor-aktor dalam model *helix* ini beserta peran dari masing-masing aktornya.

Sebagaimana yang dimukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) mengembangkan model *triplehelix* yang mengadopsi model inovasi spiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (pemerintah, swasta dan akademis) pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione, 1998). Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen pengetahuan utama; li) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di pasaran; Dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi (Arnkil et al., 2010).

Model *Triplehelix* menyiratkan kompleksitas yang meningkat dalam hal elemen operasional utama, atau komponen, dan hubungan di antara elemen-elemen ini dengan mempertimbangkan fungsinya. Dalam meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang ini peneliti akan menggunakan media *helix* yang menekankan pada peran serta masyarakat Sabang dalam proses inovasi membangun konsep sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah ditunjang dengan modal informasi, komunikasi dan jejaring sosial.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Meningkatnya permasalahan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang yang berbatasan dengan tiga negara sekaligus yaitu Malaysia, Thailand dan India berpengaruh terhadap penguatan dan

kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga stabilitas keamanan maritim. TNI AL sebagai bagian integral BNPP sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara aktif berperan serta dalam pengelolaan wilayah perbatasan dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan laut sesuai Undang-undang No.34 Tahun 2004 Pasal 9 huruf e tentang Dawilhanla.

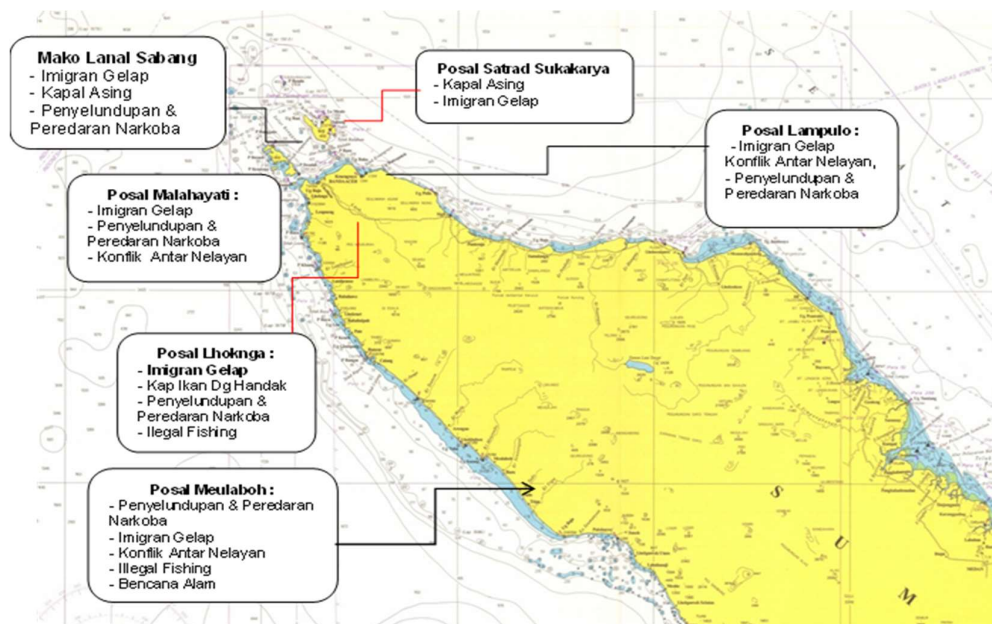
Penelitian terkait Implementasi Program Spotmar TNI AL dalam Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Pesisir di Wilayah Perbatasan Sabang dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada sejumlah pejabat dilingkungan Staf Umum Potensi Maritim (Spotmar) TNI AL, pejabat Pangkalan TNI AL Sabang, pejabat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pejabat PSDKP Kota Sabang, pengamat/Akademisi TNI AL, pengamat/akademisi Universitas Pertahanan RI, Tokoh masyarakat (Panglima Laot) Kota Sabang, komunitas Nelayan Sabang dan pengusaha dalam rangka memperoleh data dan keterangan disamping observasi dan studi dokumentasi sebagai pelengkap penelitian yang dilaksanakan.

4.2.1 Kondisi Ketahanan Masyarakat Pesisir di Wilayah Perbatasan Sabang Saat ini

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Jadi, ketahanan sosial

merupakan produk interaksi dinamis antara faktor eksogen dengan endogen, sehingga kemampuan tersebut menunjukkan adanya aspek dinamika dan keseimbangan (*community homeostatic and dynamic*).

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semua atau justru lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka ketahanan sosial bukanlah suatu finish product, tetapi sebagai proses dan dinamika masyarakat (Kemensos RI, 2008). Adanya berbagai permasalahan sosial yang ditunjukkan dengan adanya gangguan keamanan maritim yang terjadi di wilayah kerja Lanal Sabang seperti yang terlihat pada gambar peta kerawanan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Peta Kerawanan Sabang

Sumber: Laporan Triwulan Lanal Sabang 2021

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Sabang hingga kurun waktu tahun 2021 ini telah mengalami berbagai permasalahan keamanan maritim di titik-titik fokus lokasi kerawanan baik di wilayah Mako Lanal Sabang, Posal Sukakarya, Posal Malahayati, Poasal Lhoknga, Posal Meulaboh dan Posal Lampulo dengan permasalahan khas keamanan maritim seperti adanya kasus imigran gelap, penyelundupan dan peredaran narkoba, penangkapan ikan dengan bahan peledak, konflik antar nelayan, illegal fishing, perubahan cuaca dan bencana alam. Hal ini tentunya apabila tidak ditangani dengan seksama maka akan menimbulkan adanya gangguan terhadap tingkat kecemasan, interaksi sosial sehingga dapat mengakibatkan permasalahan sosial dalam tatanan masyarakat yang dikategorikan sebagai rentannya ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M mengenai kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Sabang:

Lanal Sabang melihat fenomena ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan khususnya, masyarakat nelayan seringkali tertangkap di negara lain seperti Malaysia, Thailand dan India dikarenakan kurangnya pemahaman tentang batas wilayah, nelayan mencari ikan di zona abu-abu yang merekapun tidak menyadarinya sehingga ketika ada kapal patroli dari negara tetangga mereka tertangkap Hal ini perlu mengedukasi nelayan tentang batas-batas mana yang mereka boleh memasuki tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Terjadinya konflik internal antar nelayan karena perbedaan hasil tangkap dan perbedaan persepsi tentang batas wilayah tangkap mereka sehingga harus diberikan pemahaman serta mengedukasi masyarakat bagaimana cara melakukan penangkapan ikan secara efektif mengingat kondisi cuaca di wilayah Sabang ini tidak dapat diprediksi agar hasil tangkap mereka nantinya dapat sesuai dengan target. Lanal Sabang dalam hal ini banyak melakukan kegiatan Komunikasi sosial kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, kegiatan Bakti Sosial dengan cara bersih pantai, penanaman mangrove agar terjalin kedekatan antara TNI AL dengan masyarakat sedangkan permasalahan yang spesifik mengenai konflik antar nelayan yang pernah terjadi di wilayah lhok/teluk mengenai wilayah perairan / lokasi mencari ikan yang menjadi tanggung jawab para panglima laut masing-masing lhok.

Panglima Laot Kota Sabang Muhmmad Ali Rani dalam kesempatan wawancaranya mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah Sabang aitu bahwa:

Adanya permasalahan dari sisi internal nelayan di wilayah Sabang masuknya nelayan dari luar wilayah Sabang seperti sengketa penangkapan ikan dari nelayan kecil 18 mil dari pulau rondo, 3GT sementara nelayan besar acara mincing mania daiatas 10 GT 40 Gt nelayan dari aceh timur sampai banda Aceh menggunakan lampu robot dibawah 100GT nelayan kita terancam sehingga dihari berikutnya ikan tidak ada lagi nelayan terancam inilah yang seringkai terjadi di masyarakat nelayan kita sedangkan dari luar masalah yaitu penampungan pengungsi Rohingya ada himbau ancaman yang sifatnya dari eksternal menangani pengungsi, berisiko bagi warga di darat menolong nyawa manusia walaupun ada aturan.

Selanjutnya permasalahan lain diungkapkan oleh Basri A.Pi., M.Si Kepala PSDKP Lampulo sebagai berikut:

Terjadinya banyak permasalahan keamanan maritim di wilayah Sabang ini banyak melibatkan nelayan lokal kita, seringkali nelayan Aceh tertangkap di negara malaysia, Thailand dan India, berbagai aksi kejahatan dilaut juga melibatkan nelayan lokal sehingga membutuhkan kerjasama antar stakeholder terkait dapat menangani. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dilihat dari sisi alokasi anggaran, tugas dan wewenang masing-masing instansi seperti jika terjadinya pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing yang memasuki perbatasan maka hal ini akan ditangani oleh PSDKP Lampulo dan jika terjadinya ancaman dalam bentuk pelanggaran kedaulatan yang membutuhkan penanganan menggunakan Alutsista dan perlengkapan militer lainnya maka hal ini merupakan tanggung jawab dan wewenang TNI AL untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerjasama lain yang dilaksanakan oleh pihak PSDKP Lampulo yaitu dengan bersinergi dalam satauan gabungan atau Satgas 115 yang beranggotakan hakim ataupun Jaksa (penegak hukum) ditambah dengan TNI Angkatan Laut dan Polisi yang bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penangkapan kapal asing yang dilakukan pihak TNI AL dan kemudian diserahkan kepada PSDKP Lampulo guna dilakukakn penyidikan yang pada akhirnya kapal tersebut disita oleh negara dan berdasarkan keputusan hukum dihasilkan aset sebesar 21 Milyar yang dikembalikan kepada kas negara.

Hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa kondisi Sabang sebagai wilayah perbatasan rentan terhadap terjadinya permasalahan keamanan maritim namun berbagai pihak mulai dari masyarakat dan juga tokoh masyarakat seperti Panglima Laot juga stakeholder terkait saling bersinergi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Ketahanan sosial yang merupakan suatu kemampuan untuk mendorong keterlibatan dan mempertahankan hubungan positif dan untuk bertahan dan pulih dari stres kehidupan dan isolasi sosial yang menekankan kapasitas individu untuk bekerja dengan orang lain untuk mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Kemampuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

4.2.1.1 *Copieng Capacities*

Copieng Capacities yaitu Kemampuan untuk mengatasi gangguan yaitu kemampuan aktor sosial untuk menyelesaikan segala macam permasalahan dalam hidup mereka. Aktor sosial yang dimaksudkan peneliti dalam hal ini adalah masyarakat nelayan yang terdampak oleh adanya permasalahan keamanan maritim sebagaimana yang dikemukakan perwakilan masyarakat nelayan sebagai berikut:

Wawancara peneliti dengan Mohammad Ali Rani, Panglima Laot Kota Sabang adalah sebagai berikut:

Adanya permasalahan dari sisi internal nelayan di wilayah Sabang masuknya nelayan dari luar wilayah Sabang seperti sengketa penangkapan ikan dari nelayan kecil 18 mil dari pulau rondo, 3GT sementara nelayan besar acara mancing mania daiatas 10 GT 40 Gt nelayan dari aceh timur smpe banda aceh menggunakan lampu robot dibawah 100GT nelayan kita terancam sehingga keesokan harinya ikan tdk ada lagi nelayan terancam Hal ini menjadi keluhan masyarakat sepi melaut. Seringkali perbedaan persepsi tentang batas tangkap dan ego para nelayan ini mengakibatkan konflik.

Wawancara dengan Azhar Hasyim, nelayan Gampong Kuta Ateuh:

Jika ada kejadian seperti penangkapan ikan oleh nelayan dari luar daerah kami apalagi itu menggunakan kapal tangkap yang lebih besar, menggunakan bakar lampu maka keesokan harinya ikan sudah tidak ada lagi karena habis oleh penangkapan yang merugikan nelayan kami dan kejadian ini kemudian kami laporkan kepada Panglima Laot untuk dicarikan solusinya. Belum lagi ada cuaca buruk yang mengakibatkan kami para nelayan tidak bisa mencari ikan, gelombang tinggi sehingga tidak memungkinkan kami untuk pergi melaut dan biasanya kami hanya menunggu sampai cuaca membaik barulah kami kembali melaut.

Selanjutnya hal senada disampaikan oleh Zulkarnain, Nelayan Lhok Beurawang sebagai berikut:

Kejadian seperti penyelundupan narkoba memang pernah ada namun itu di daerah kami melewati perairan laut kami dengan menggunakan kapal tapi waktu itu kami ketakutan dan khawatir dengan gelagat mencurigakan mereka karena jumlah mereka lebih banyak dan akhirnya kami tidak berani untuk melaporkan kepada Panglima Laot karena adanya ancaman dari para sindikat penyelundupan narkoba tersebut. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi kendala kami untuk melaut belum lagi adanya nelayan dari luar yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal yang lebih besar serta peralatan tangkap yang lebih canggih hal ini sangat mengganggu kami para nelayan.

Demikian halnya yang disampaikan perwakilan nelayan Pasiran Jutriyus mengatakan bahwa:

Jika kondisi laut yang sepi hasil tangkap terkadang kami nelayan merasa kecewa karena harus pulang dengan tangan kosong, namun kami mau tidak mau harus mendapatkan ikan dengan cara mengambil ikan ini dengan menggunakan alat tangkap lain namun Panglima Laot selalu mengingatkan untuk berhati-hati jangan sampai merusak lingkungan laut apalagi terumbu karang karena akan dapat mempengaruhi berkembangbiakan ikan itu sendiri dan hal ini tentunya akan merugikan nelayan karena keesokan harinya ikan tidak ada lagi dan butuh waktu lama untuk berkembangbiakan tersebut.

Wawancara peneliti dengan salah satu nelayan Lhok Kota Sacriadi yang mengatakan bahwa:

Beberapa waktu lalu memang pernah ada waga asing ini berada di tengah laut mengapung di atas kapal sepertinya kondisi mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kami warga menolong mereka membawa mereka kedaratan karena alasan kemanusiaan namun ini kemudian sudah kami laporkan kepada Panglima Laot untuk ditindaklanjuti. Permasalahan lain yang sering kami hadapi adalah adanya perubahan cuaca yang mengakibatkan kami tidak bisa melaut untuk mencari ikan sehingga kami harus kembali tanpa membawa hasil dan kami hanya bisa menunggu sampai cuaca kembali membaik.

4.2.1.2. Adaptive Capacities

Adaptive Capacities yaitu Kemampuan untuk belajar dari masa lalu dan kemudian mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Kompleksnya permasalahan keamanan maritim yang terjadi di wilayah Sabang sebagai wilayah perbatasan sehingga masyarakat diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sebagaimana yang dikemukakan para perwakilan nelayan sebagai berikut:

Wawancara dengan Azhar Hasyim, nelayan Gampong Kuta Ateuh:

Pada saat cuaca buruk kami tetap melaut, mencari tempat lain yang kemungkinan ada ikan yang bisa untuk ditangkap, nelayan umumnya sudah bisa memperkirakan kapan waktu untuk menangkap ikan dan daerah mana yang terdapat pada saat cuaca kurang bagus seperti ikan tuna dan cakalang. Kondisi seperti ini sering terjadi di daerah kami dan kami nelayan tetap saja melaut karena tidak ada kegiatan lain selain mencari ikan di laut dan ini merupakan satu-satunya penghasilan kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami dan keluarga. Di wilayah kami juga seringkali ada kejadian pencurian ikan oleh pihak nelayan dengan cara merusak lingkungan laut kejadian seperti ini dengan segera kami melaporkan kepada Panglima Laot dan kalau terbukti melanggar pelaku akan di sidang melalui peradilan adat oleh Panglima Laot. Selain itu ada juga konflik antar nelayan karena perbedaan pandangan tentang lokasi pencarian ikan yang kami anggap itu merupakan wilayah kami namun tiba-tiba nelayan dari luar daerah juga melakukan penangkapan ikan ditempat yang sama yang mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan kami.

Selanjutnya hal senada disampaikan oleh Zulkarnain, Nelayan Lhok Beurawang sebagai berikut:

Walau bagaimanapun kondisi cuaca kami akan tetap mencari ikan di laut karena ini adalah pekerjaan kami sehari hari dan kami akan mencari tempat lain yang gelombangnya tidak besar, usaha kami juga terkadang tidak membuahkan hasil sehingga kami kembali kedaratan tanpa membawa ikan satupun, jika hal ini terjadi biasanya kami hanya bisa menunggu gelombang laut mereda keesokan harinya sehingga memang perubahan cuaca seperti ini sangat mengganggu kegiatan kami sehari hari.

Demikian halnya yang disampaikan perwakilan nelayan Pasiran Jutriyus mengatakan bahwa:

Banyaknya kejadian seperti pencurian ikan di daerah kami memang sangat mengganggu kegiatan kami begitu juga adanya perubahan cuaca yang menyebabkan kami tidak bisa melaut dan harus menunggu cuaca kembali membaik jika kondisi ini berlangsung dalam beberapa hari lalu bagaimana kemudian kami bisa mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kami, kejadian seperti ini memang sering terjadi apalagi jika ada nelayan dari luar daerah kami tiba-tiba mengambil ikan dengan peralatan yang lebih canggih otomatis kami juga kesulitan untuk menangkap ikan sampai beberapa hari kedepan.

Wawancara peneliti dengan salah satu nelayan Lhok Kota Sacriadi yang mengatakan bahwa:

Kami nelayan sudah terbiasa mengalami permasalahan seperti perubahan cuaca, ada juga nelayan dari luar daerah kami yang datang dengan kapal yang lebih besar lalu melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran yang menyebabkan kami tidak mendapatkan tangkapan sedikitpun. Kejadian ini kemudian kami laporkan kepada Panglima Laot dengan hukum adat namun kadang juga gagal sehingga permasalahan harus diselesaikan secara hukum pemerintah. Namun kejadian seperti ini terus saja terjadi.

4.2.1.3 Transformative Capacities

Transformative Capacities yaitu kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah ataupun lembaga lainnya yang dapat mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh perwakilan nelayan sebagai berikut:

Wawancara dengan Mohammad Ali Rani, Panglima Laot Kota Sabang adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah sejak otonomi ada perhatian, pembagian sepeda motor untuk panglima laot, bagaimana memberdayakan hukum laot Masyarakat, pemerintah juga membagikan peralatan tangkap bagi nelayan tradisional, nelayan di saat cuaca buruk yang ada lahan bergantung dengan hasil laut, dan harapan pemerintah membantu dari boat kecil menjadi boat besar masalah perubahan cuaca selama ini kami bekerjasama dg BMKG, dishub himbauan masyarakat menggunakan aplikasi android, demikian juga perhatian kepada anak nelayan dengan menanggung biaya pendidikan bagi siswa yang berprestasi.

Wawancara dengan Azhar Hasyim, nelayan Gampong Kuta Ateuh:

Pemerintah selama ini selalu berkoordinasi dengan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kota sehingga apa yang menjadi keluhan nelayan dan kebutuhan nelayan selama ini sampaikan melalui lembaga Panglima Laot demikian juga sebaliknya Panglima Laot rutin mengadakan pertemuan dengan aparat pemerintahan untuk mengupayakan kesejahteraan para nelayan.

Selanjutnya hal senada disampaikan oleh Zulkarnain, Nelayan Lhok Beurawang sebagai berikut:

Kami sebagai warga nelayan di pesisir Lhok Beurawang ini merasakan perhatian pemerintah, seringkali kami menerima bantuan pemerintah berupa alat tangkap yang memang sangat kami butuhkan untuk menunjang kegiatan kami dalam mencari ikan disetiap harinya, melalui Panglima Laot dan Panglima Laot kemudian akan membagikan bantuan pemerintah ini dengan sangat adil.

Demikian halnya yang disampaikan perwakilan nelayan Pasiran Jutriyus mengatakan bahwa:

Pemerintah selama ini banyak membantu kami para nelayan melalui Panglima Laot, bantuan ini biasanya berupa alat tangkap ikan yang sesuai dan sangat dianjurkan karena alat ini tidak merusak lingkungan dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya kepada kami para nelayan.

4.2.2. Implementasi Program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan Ketahanan sosial Masyarakat Pesisir di wilayah perbatasan Sabang

Program yang dilaksanakan Spotmar TNI AL, merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan Potensi Maritim di Satkowil dan Satnonkowil melalui kegiatan-kegiatan Bhakti TNI AL, Bintangwilmar dan Komsosmar yang disusun dalam bentuk program kerja. Program kerja ini di rencanakan oleh masing-masing kepabanan yang ada di Spotmaral dengan berkoordinasi dengan Satkowil dan Satnonkowil yang ditunjuk dengan memperhatikan faktor geografi, demografi dan kondisi sosial wilayah yang akan dijadikan sebagai sasaran pembinaan. Untuk Ban VI sendiri merencanakan program kerja kegiatan pembinaan potensi maritim dengan *locus* di wilayah perbatasan Laut dan Pulau-pulau kecil terluar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Program Spotmar TNI AL di Lanal Sabang Tahun 2018-2021

NO.	BIDANG TAHUN	PROGRAM KEGIATAN	METODE	SASARAN	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH PERSONEL (ORANG)	TEMPAT
1.	Pembinaan Kemampuan Potensi Maritim (Puanpotmar)	Penataran Kemampuan Potensi Maritim (Tarpuanpotmar) Tersebar di Tingkat Lanal	Tatap Muka	Prajurit TNI AL	SPOTMAR TNI AL	100	Mako Lanal Sabang
2.	Komunikasi Sosial Maritim (Komsosmar) Tahun 2018	Komunikasi Sosial Maritim dengan Komponen Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	Tatap Muka/ Ceramah	Komponen masyarakat maritim	SPOTMAR TNI AL	250	Gedung Serba Guna Lampulo
3.	Pembinaan Wilayah Ketahanan Maritim (Bintahwilmar) Tahun	Ketahanan Pangan Budaya Rumput Laut	Kegiatan Fisik	Masyarakat Nelayan	Spotmar TNI AL dan Pemerintah Daerah	-	-
4.	Bakti TNI AL Tahun 2019	Bersih Pantai dalam Rangka Hari Dharma Samudera	Kegiatan Fisik	Masyarakat sekitar pantai, unsur Forkopimda Sabang	SPOTMAR TNI AL	210	Pantai Sumur tiga le Maulee Sabang
5.	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut melalui wawasan kebangsaan di wilayah kerja Lanal Sabang	Lomba Cerdas Cermat	Siswa/Siswi setingkat SMU	SPOTMAR TNI AL	170	Dermaga Lanal Sabang

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa Spotmar TNI AL selama kurun waktu 2018-2021 telah melaksanakan di wilayah perbatasan Sabang yaitu Pembinaan Kemampuan Potensi Maritim melalui Penataran Kemampuan Potensi Maritim Tersebar di Lanal, Komunikasi Sosial Maritim melalui kegiatan komunikasi dengan komponen masyarakat, Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim dengan melaksanakan Ketahanan pangan, budidaya rumput laut, Bakti TNI AL dengan melaksanakan kegiatan bersih pantai bersama masyarakat sekitar dan aparat pemerintah kota Sabang, Pembinaan wilayah perbatasan laut dan PPKT dengan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bersama siswa siswi setingkat SMU di wilayah Kota Sabang.

Hasil Wawancara dengan Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto tentang program Spotmar TNI AL adalah sebagai berikut:

Peran Spotmar dalam melaksanakan Wilayah Pertahanan Laut adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan Potensi Maritim yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Satkowil dan Satnonkowil. Kegiatan pengawasan dan evaluasi, ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, kendala-kendala yang di hadapi dan upaya mengatasinya serta sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Kegiatan Binpotmar yang dilaksanakan oleh Satkowil dan Satnonkowil ini berupa pembinaan komunikasi sosial maritim yang dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran bela negara, cinta tanah air wawasan kebangsaan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Spotmar juga menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah maritim dengan memperhatikan faktor geografi, demografi dan kondisi sosial, kemudian ada kegiatan Bakti TNI AL dan pembinaan wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Ruang Alat Kondisi(RAK) Juang yang tangguh.

Hal ini juga diperkuat melalui penjelasan Paban VI Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kolonel Laut (P) Robertus Waskito M.M. adalah sebagai berikut:

Spotmar TNI AL, merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan Potensi Maritim di Satkowil dan Satnonkowil melalui kegiatan-

kegiatan Bhakti TNI AL, Bintangwilmar dan Komsosmar yang disusun dalam bentuk program kerja. Program kerja ini di rencanakan oleh masing-masing kepabeanan yang ada di Spotmaral dengan berkoordinasi dengan Satkowil dan Satnonkowil yang ditunjuk dengan memperhatikan faktor geografi, demografi dan kondisi sosial wilayah yang akan dijadikan sebagai sasaran pembinaan. Untuk Ban VI sendiri merencanakan program kerja kegiatan pembinaan potensi maritim dengan *locus* di wilayah perbatasan Laut dan Pulau-pulau kecil terluar. Kemudian pimpinan TNI AL juga memiliki program untuk mengembangkan program Kampung Bahari Nusantara di setiap Satkowil dan Satnonkowil. Kampung Bahari Nusantara (KBN) ini di bangun dengan lima bidang kluster, yaitu Kluster pariwisata, kluster kesehatan, kluster pendidikan, kluster ekonomi dan kluster pertahanan. Kelima bidang kluster yang akan dikembangkan tersebut nantinya akan bersinergi dengan Instansi terkait di Pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan KBN ini menjadi program nasional dan diharapkan menjadi proyek percontohan bagi kampung-kampung di wilayah lainnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Letkol Laut (P) Hari Budiman, M.Tr Hanla selaku Pabandya Ketahanan dan Kekuatan Masyarakat di wilayah perbatasan bahwa:

Spotmar TNI AL selama ini berperan dalam pelaksanaan pembinaan Potensi Maritim di Satkowil dan Satnonkowil melalui kegiatan-kegiatan Bhakti TNI AL, Bintangwilmar dan Komsosmar yang disusun dalam bentuk program kerja kemudian merumuskan kebijakan Program kerja ini di rencanakan oleh masing-masing kepabeanan yang ada di Spotmaral dengan berkoordinasi dengan Satkowil dan Satnonkowil yang ditunjuk dengan memperhatikan faktor geografi, demografi dan kondisi sosial wilayah yang akan dijadikan sebagai sasaran pembinaan. Sedangkan Ban VI sendiri fokus merencanakan program kerja kegiatan pembinaan potensi maritim dengan *locus* di wilayah perbatasan Laut dan Pulau-pulau kecil terluar salah satunya dalam bidang ketahanan dan kekuatan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T., M.M. mengatakan bahwa:

Jika melihat tugas dan Fungsi Lanal Sabang sebagai suatu Pangkalan di wilayah perbatasan ini adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi, pembinaan potensi Nasional menjadi kekuatan pertahanan di bidang maritim, pembinaan teritorial

matra laut dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas. pembinaan potensi nasional maritim yang meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana nasional di bidang maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan. kemudian kegiatan Lanal Sabang dalam kegiatan Potensi Maritim yaitu dengan Komunikasi Sosial, Pembinaan Ketahanan Wilayah, Bhakti TNI AL, Pembinaan Ketahanan Pangan PPKM Penanganan Covid-19.

Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Sabang Kapten Laut (K) dr Eko Chandra Aprilianto adalah sebagai berikut:

Lanal Sabang ini berada di wilayah perbatasan yang tentunya memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Pembinaan potensi maritim di wilayah ini sangat diperlukan melihat masyarakat nelayan di wilayah perbatasan Sabang ini masih perlu untuk ditingkatkan. Dengan melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat nelayan melalui kegiatan komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, bakti TNI AL serta melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat seperti Panglima Laot diharapkan akan tercipta kemandirian TNI AL dengan masyarakat. Selama ini adanya Program Spotmar TNI AL dapat berjalan sesuai arahan dan instruksi dari komando atas.

Selanjutnya program kegiatan Spotmar ini akan dilaksanakan oleh Satuan TNI AL ditingkat bawah yaitu Satkowil dan Satnonkowil. Implementasi program ini merupakan suatu set hubungan antar pihak yang berperan sebagai penentu kebijakan. Para pihak yang dimaksud jelas memiliki kewenangan (*power*) untuk menentukan tujuan-tujuan tertentu serta merumuskan cara untuk mencapai tujuan. faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

4.2.2.1 Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik ini perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk

menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto adalah sebagai berikut:

Sejauh ini komunikasi yang efektif menjadi hal yang mutlak diperlukan, organisasi ini sangat membutuhkan guna menentukan berlangsungnya suatu kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan. Di lingkungan TNI kita kenal hierarki yang jelas bagaimana pimpinan menginstruksikan sesuatu yang memang wajib di respon oleh seorang bawahan, demikian juga dengan pelaksanaan program dari tingkat Mabesal dalam hal ini Spotmar TNI AL kepada jajaran dibawahnya atau Satkowil dan Satnonkowil, terlebih dahulu harus diinformasikan melalui direktif untuk dilaksanakan oleh satuan bawah, setelah pelaksanaan juga satuan ditingkat bawah wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

Hal senada juga disampaikan Paban VI Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kolonel Laut (P) Robertus Waskito M.M. adalah sebagai berikut:

Selama ini dalam kegiatan yang telah berjalan segala sesuatu harus diinformasikan terlebih dahulu kepada satuan bawah baik Satkowil maupun Satnonkowil sebagai pelaksana dilapangan, hal ini dimaksudkan agar memudahkan komunikasi demi suksesnya kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya satuan bawah akan melaporkan hasil kegiatan yang telah terlaksana di satuan masing-masing.

Senada dengan apa yang disampaikan Letkol Laut (P) Hari Budiman, M.Tr Hanla selaku Pabandya Ketahanan dan Kekuatan Masyarakat di wilayah perbatasan bahwa:

Spotmar TNI AL rutin melaksanakan pengawasan dan evaluasi (Wasev) pada satuan Potmar tingkat bawah baik Lantamal maupun Lanal, hal inipun sama sebelumnya harus diinformasikan terlebih dahulu agar satuan bawah dapat melakukan persiapan tentang kegiatan yang mereka laksanakan, menyampaikan informasi kepada satuan atas kendala apa yang mereka hadapi dalam melaksanakan program kegiatan yang diinstruksikan oleh Spotmar TNI AL selaku Regulator.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M sebagai berikut:

Sebagai satuan ditingkat bawah, Lanal Sabang selalu berkoordinasi dengan satuan ditingkat Mabasal, jika terkait dengan kegiatan pembinaan potensi maritim maka kami akan koordinasikan dengan Spotmaral atau Dispotmaral, demikian juga dengan Spotmaral akan memberikan informasi jika terkait dengan Lanal Sabang untuk melaksanakan kegiatan kemudian terbit surat resmi berupa direktif yang akan menginstruksikan tentang kegiatan dimaksud. Dan setelah selesai melaksanakan kegiatan maka Lanal Sabang akan membuat laporan pelaksanaan kepada Spotmaral.

4.2.2.2 Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, adanya sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Demikian halnya dengan implementasi program Spotmar TNI AL faktor Sumber daya akan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan program yang dilaksanakan. Sumber Daya manusia yang dimaksudkan disini adalah personel TNI AL, anggaran dan sarana prasarana Spotmar TNI AL guna melaksanakan kegiatan program.

Hasil wawancara dengan Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto tentang program Spotmar TNI AL adalah sebagai berikut:

Personel Potmar yang ada di Satkowil dan Satnonkowil masih belum dapat terpenuhi sesuai DSP, secara keseluruhan jumlah personel Potmar yang ada baru terpenuhi kurang lebih 44 % dari jumlah DSP. Hal ini disebabkan keterbatasan personel yang ada di Satkowil dan Satnonkowil sehingga keterisian personel terbagi pada tiap-tiap bagian pada satker tersebut termasuk pada staf potmar. Namun demikian kekosongan tersebut dapat teratasi dengan memaksimalkan personel yang ada dan rangkap jabatan dari perwira yang berada pada satker tersebut. Dalam rangka meningkatkan Profesionalisme dalam bidang Potmar, Saat ini Spotmaral dan Dispotmaral secara rutin dan berkesinambungan melaksanakan kegiatan kursus/penataran kemampuan Potmar kepada personel yang ada di Satkowil dan Satnonkowil untuk meningkatkan kemampuan prajurit sebagai insan Pembina Potensi Maritim. Perlu di ketahui, sesuai dengan amanah yang tertulis didalam Undang-

Undang nomor 34 Tahun 2004 pada pasal 9(e) menyebutkan salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) guna mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh dalam rangka mendukung pertahanan negara di laut yang dilaksanakan melalui Pembinaan Potensi Maritim maupun dalam bentuk Operasi Dawilhanla. Sebagai Subjek dalam melaksanakan Kegiatan ini adalah Seluruh Prajurit TNI AL tanpa terkecuali selaku Insan Pembina Potensi Maritim.

Hal senada juga disampaikan Paban VI Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Spotmar, Kolonel Laut (P) Robertus Waskito M.M. adalah sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan Profesionalisme dalam bidang Potmar, Saat ini Spotmaral dan Dispotmaral secara rutin dan berkesinambungan melaksakan kegiatan kursus/penataran kemampuan Potmar kepada personel yang ada di Satkowil dan Satnonkowil untuk meningkatkan kemampuan prajurit sebagai Insan Pembina Potensi Maritim. Personel di jajaran Spotmar baik Satkowil maupun Satnonkowil sebetulnya belum terisi sesuai dengan DSP yang ada. Dengan demikian perlu diadakan kursus-kursus atau penataran yang di laksanakan peruntukannya bukan hanya untuk prajurit-prajurit yang berdinasi di Potmar saja namun juga personel yang berdinasi di luar bidang Potmar. Namun demikian saat ini pelatihan-pelatihan ataupun kursus tersebut saat ini masih di utamakan bagi personel yang berdinasi di bidang Potmar.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di wilayah perbatasan ini Lanal Sabang memang sangat membutuhkan personel yang memiliki kualifikasi di bidang potensi maritim,walaupun sudah ada personel yang telah mengikuti kursus ataupun penataran namun jumlahnya belum signifikan untuk menangani permasalahan di wilayah Sabang mengingat luasnya wilayah kerja Lanal Sabang, namun untuk meningkatkan SDM Lanal Sabang tetap berupaya mengirim personil untuk mengikuti penataran dan latihan di bidang Potensi Maritim yang diselenggarakan oleh Spotmar TNI AL.

Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Sabang Kapten Laut (K) dr Eko Tjandra Aprilianto adalah sebagai berikut:

Jika melihat fenomena di wilayah perbatasan seperti halnya Sabang tentunya sangat diperlukan personel yang memiliki kualifikasi di bidang potensi maritim, dihadapkan juga dengan luasnya wilayah kerja Lanal Sabang yang behadapan dengan tiga negara berbatasan dengan laut sehingga saat ini jika ada kurus atau penataran yang diselenggarakan oleh Spotmar TNI AL maka sebisa mungkin kami yang merupakan Satkowil jajaran untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M tentang peralatan yang dimiliki Lanal Sabang sebagai berikut:

Saat ini Lanal Sabang memiliki lima Posal dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan memiliki Alutsista terbatas yang ditempatkan di Posal-Posal yang ada yaitu Legend AIS, Radar, LRC, PAT I 1-32, Rubber Boad, Spped Fiberglass, dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dihadapkan juga dengan kondisi luasnya wilayah kerja Lanal Sabang dengan unsur Jenis KAL dan Sea Rider yang dimiliki Lanal dinilai kurang memadai dengan kondisi siap terbatas. Hal ini masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan, sarana serta prasarana dihadapkan dengan panjang garis batas yang harus diawasi, hal inilah yang nantinya akan memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti halnya yang terjadi di wilayah Sabang.

Hal yang sama dikemukakan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Siti Metrianda Akuan S.T., M.Si. adalah sebagai berikut:

Dalam hal pengelolaan batas wilayah negara dan juga mengelola wilayah perbatasan pada tingkat pusat pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sedangkan untuk ditingkat daerah pemerintah membentuk Badan Pengelola Daerah, Namun dalam pelaksanaannya untuk wilayah perbatasan masih seringkali terjadi tumpang tindih antar institusi, artinya munculnya permasalahan egosektoral dan perbedaan kepentingan menjadikan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah

perbatasan cenderung terhambat. Kondisi inilah yang mengakibatkan sebagian besar wilayah perbatasan sulit dijangkau atau dengan kata lain wilayah ini menjadi terisolir dan secara umum memiliki infrastruktur ataupun sarana prasarana yang sangat terbatas. Sebagai contoh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan timur dimana pemerintah Provinsi telah mengeluarkan peraturan Gubernur untuk pembentukan badan persiapan pengembangan kawasan khusus perbatasan yang bersifat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) non struktural yang memiliki fungsi kerja dan tugas pokok sebagai Badan pengelola daerah perbatasan sehingga secara otomatis permasalahan daerah perbatasan ditangani oleh SKPD terkait.

Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Fasilitas dan Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Willianto P. Siagian S.STp. mengatakan bahwa:

Mayoritas kawasan perbatasan di Indonesia ini merupakan daerah tertinggal yang sulit dijangkau dan pada umumnya tidak berpenghuni karena memang tidak layak untuk dihuni terutama sulitnya air bersih yang urgen harus terpenuhi. Disinilah peranan BNPP sebagai badan yang mengelola wilayah perbatasan dibantu dengan anggota tim BNPP yang terdiri dari 19 Kmenterian/ lembaga tinggi negara lainnya termasuk didalamnya ada peran TNI selaku anggota tim yang fokus dibidang pertahanan negara untuk ikut serta dalam mengelola wilayah perbatasan. Misalnya jika kita meninjau wilayah perbatasan terutama Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang kita perioritaskan PPKT yang dikategorikan rawan sejumlah 12 Pulau kecil yang tidak berpenghuni, kita koordinasikan untuk kerjasama dengan pihak TNI untuk dijaga oleh anggota Satuan Tugas pulau terluar kemudian didata kebutuhan apa yang mereka butuhkan sehingga pulau tersebut layak untuk dihuni oleh para anggota Satgas TNI seperti kebutuhan air bersih, kebutuhan tower jaringan komunikasi dan akses jalan dan hal ini BNPP akan koordinasikan dengan yaitu dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan ataupun kementerian terkait lainnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Letkol Laut (P) Hari Budiman, M.Tr Hanla selaku Pabandya Ketahanan dan Kekuatan Masyarakat Spotmar, mengatakan bahwa:

Keterbatasan personel yang memiliki kualifikasi di bidang potensi maritim yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembinaan baik di Satkowil dan Satnonkowil karena sesungguhnya setiap prajurit TNI AL ini dituntut untuk memahami dan mengenai kegiatan Pembinaan potensi maritim, sehingga kursus-kursus atau penataran yang di laksanakan peruntukannya bukan hanya untuk prajurit-prajurit yang berdinasi di Potmar saja namun juga personel yang berdinasi di luar bidang Potmar.

Hasil wawancara dengan Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto adalah sebagai berikut:

Tujuan terselenggaranya kegiatan Spotmar ini bertujuan untuk terwujudnya kemandirian TNI AL dengan rakyat dan tercapainya Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh dan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan didukung dari anggaran Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla). Kewenangan yang diberikan Spotmar TNI AL selaku Regulator kepada Pelaksana kebijakan (Operator) demikian halnya dengan kegiatan di Satkowil maupun Satnonkowil melaksanakan kegiatan terkait dengan program berdasarkan direktif yang telah dibuat oleh Spotmar TNI AL dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan sepenuhnya oleh Lanal Sabang yang anggarannya diterima melalui DIPA daerah.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M sebagai berikut:

Kegiatan yang dilaksanakan di Lanal Sabang dalam upaya pembinaan potensi maritim selama ini yang meliputi komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan bakti TNI AL telah terlaksana sesuai instruksi dari komando atas dalam hal ini Spotmar TNI AL dan sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut berasal dari anggaran Spotmar Mabesal dan sinergi dengan instansi terkait.

4.2.2.3 Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M sebagai berikut:

Program Spotmar TNI AL selama ini terlaksana dengan baik dari mulai kegiatan penataran kemampuan potensi maritim, komunikasi sosial maritim dengan sosialisasi dengan komponen pemerintah maupun komponen masyarakat, adanya pembinaan ketahananwilayah dengan melaksanakan program ketahanan pangan budidaya rumput laut unuk mengedukasi masyarakat menghasilkan pengahsilan tambahan, ada juga kegiatan bersih pantai dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada para siswa setingkat SMA agar menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lanal Sabang membentuk panitia internal agar dapat dilaksanakan secara optimal serta jelas siapa berbuat apa dan masing-masing personel yang ditunjuk akan bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya secara sungguh-sungguh.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapten Laut (K) dr Eko Tjandra, Paspotmar Lanal Sabang adalah sebagai berikut:

Kegiatan pembinaan Potensi Maritim yang telah dilaksanakan selama ini antara lain komunikasi sosial maritim dengan sosialisasi dengan komponen pemerintah maupun komponen masyarakat, pembinaan ketahanan wilayah dengan melaksanakan program ketahanan pangan budidaya rumput laut, selain itu ada juga kegiatan bersih pantai dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada para siswa setingkat SMA telah dapat dilaksanakan dengan baik, selesai kegiatan akan dilaporkan pelaksanaannya kepada Spotmar TNI AL untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah kami laksanakan.

4.2.2.5 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi identik dengan pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

Hasil wawancara dengan Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto adalah sebagai berikut:

Dalam setiap pelaksanaan program kegiatannya Spotmar TNI AL memiliki struktur birokrasi yang jelas baik mandiri maupun terpadu. Kasal sebagi penanggung jawab kegiatan yang di delegasikan

kepada Aspotmar Kasal dan Kadispotmaral sebelumnya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, kemudian program ini di dilaksanakan oleh Satkowil ataupun Satnonkowil TNI AL baik ditingkat Armada, Lantamal maupun Lanal dengan melibatkan pemerintah daerah ataupun instansi terkait.

Hal senada juga disampaikan Paban VI Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kolonel Laut (P) Robertus Waskito M.M. adalah sebagai berikut:

Instrumen program yang dilaksanakan dalam struktur birokrasi yang konkrit yaitu dengan struktur organisasi yang bersifat mandiri dan terpadu. Misalnya Ban VI Wiltasla melaksanakan kegiatan untuk Lanal Sabang maka sebelumnya program ini sudah menjadi pembahasan yang matang ditingkat pimpinan dalam hal ini Kasal yang telah disetujui kemudian dikoordinasikan juga dengan kementerian dan lembaga terkait Aspotmar Kasal selaku pelaksana akan menginstruksikan jajaran dibawahnya baik Satkowil maupun Satnonkowil dalam hal ini adalah Lanal Sabang melalui Direktif. Kemudian program ini terlaksana tentunya dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Hasil wawancara dengan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T.,M.M sebagai berikut:

Lanal Sabang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim memiliki prosedur birokrasi secara hierarkis dari tingkat Mabes TNI AL dalam hal direktif Kasal. Komandan Lantamal I Belawan selaku penanggung jawab kegiatan tentunya akan berkoordinasi dengan Aspotmar Danlantamal, kemudian untuk mempermudah pelaksanaan program akan membentuk panitia internal Lanal untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4.2.3. Konsep Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir di wilayah Perbatasan Sabang

Konsep *Triplehelix* merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari tiga aktor yaitu akademik, Bisnis dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan. inilah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk membangun konsep dalam mempercepat peningkatan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan

dan pulau-pulau kecil terluar khususnya di wilayah perbatasan kota Sabang.

4.2.3.1 Pemerintah

Hasil wawancara dengan Kepala PSDKP Lampulo, Basri A.Pi.M.Si sebagai berikut:

Konsep ekonomi biru yang ditawarkan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan pariwisata bahari dan pesisir semata melainkan kegiatan perikanan tangkap turut serta memberikan kontribusi dalam menjadikan pencapaian ekonomi kelautan berkelanjutan. Demikian juga dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo selama ini ikut berperan dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan melakukan pencegahan eksplitasi yang berlebihan yang memungkinkan untuk terjadinya kerusakan ekosistem laut hal ini dilakukan melalui pengawasan wilayah laut terhadap alat tangkap perikanan yang dinilai tidak ramah lingkungan. Peran dari PSDKP ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang izin usaha perikanan dimana Qanun tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya ikan yang dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengupayaan dan perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

Hasil Wawancara dengan Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto tentang program Spotmar TNI AL adalah sebagai berikut:

Peran Spotmar dalam melaksanakan Wilayah Pertahanan Laut adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan Potensi Maritim yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Satkowil dan Satnonkowil. Kegiatan pengawasan dan evaluasi, ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, kendala-kendala yang di hadapi dan upaya mengatasinya serta sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Kegiatan Binpotmar yang dilaksanakan oleh Satkowil dan Satnonkowil ini berupa pembinaan komunikasi sosial maritim yang dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran bela negara, cinta tanah air

wawasan kebangsaan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Spotmar juga menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah maritim dengan memperhatikan faktor geografi, demografi dan kondisi sosial, kemudian ada kegiatan Bakti TNI AL dan pembinaan wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) Juang yang tangguh.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Laksma TNI Halili S.H., M.H., C.FrA, Asisten Deputi Bidang Kewaspadaan Nasional Kemenkopolhukam, adalah sebagai berikut:

Sabang merupakan wilayah perbatasan barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga yaitu perairan Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah perbatasan Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan dan barat, Selat Malaka di Timur. Namun jika dilihat dari indikator SDM dan Sarpras yang ada perlu untuk ditingkatkan dalam hal ini pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan aparat terkait hadir dan merangkul semua lapisan masyarakat bersama sama meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembinaan wilayah perbatasan dengan bekerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Sabang termasuk dengan pihak akademisi dan Swasta sehingga dapat mengali sumber daya alam secara maksimal demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat wilayah perbatasan sabang.

4.2.3.2 Akademik

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Akademik Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr.Ir.Supartono, M.M., CIQaR selaku Pengamat/Akademisi/ Dosen/ Guru Besar Universitas Pertahanan RI adalah sebagai berikut:

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda Sabang menjadi pintu masuk dari ujung barat menuju Indonesia lewat jalur laut dengan pelabuhan bebasnya, Adanya situs-situs bersejarah pada zaman kerajaan sangat menarik wisatawan untuk berkunjung dan beberapa wisata bahari yang harus dikembangkan menjadi daya tarik Sabang dari sisi Pariwisata. Jika dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan Sabang relatif masih kurang memadai, fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah dengan satu universitas swasta hingga siswa cenderung memilih untuk ke

melanjutkan pendidikan ke Banda Aceh. Sehingga perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai serta memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Demikian juga dengan fasilitas keamanan maritim yang dilaksanakan oleh Lanal Sabang juga harus lebih ditingkatkan dari sisi pembangunan dermaga agar kapal-kapal besar dapat bersandar. Melihat situasi Sabang yang merupakan negara yang berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand dan India tentunya menjadi sangat rentan terhadap berbagai gangguan keamanan maritim, demikian juga dengan masyarakat yang terdampak yaitu nelayan yang memang sangat menggantungkan hidupnya dari hasil laut sehingga perlu adanya sinergi pemerintah daerah dengan stakeholder terkait termasuk pihak akademisi dan swasta untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar memiliki jiwa nasionalisme yang kuat sehingga akan memperkuat wilayah perbatasan.

4.2.3.3 Pengusaha

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku bisnis, Yuniar pengusaha

Olahan Ikan adalah sebagai berikut:

Usaha pengolahan ikan ini dirintis sejak tahun 2013, empat tahun kemudian tepatnya di tahun 2017 hingga saat ini sudah dapat menghasilkan 11 produk olahan ikan diantaranya nugget ikan, bakso ikan, kerupuk, tempura, ikan file, tahu bakso ikan dan lain-lain hingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Saat ini saya sudah memiliki 10 orang karyawan diantaranya adalah istri nelayan sekitar, untuk bahan dasar tentunya ikan daging putih berkualitas yang berasal dari nelayan sekitar. Masyarakat nelayan di sekitar Lhok ini sebetulnya memiliki solidaritas yang cukup tinggi, mereka saling bantu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan berat secara bersama-sama, kemudian kesadaran untuk saling membantu sesamanya ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya keterikatan emosional dan adanya rasa saling membutuhkan dalam jiwa kenelayanannya. Rasa kebersamaan ini merupakan suatu potensi yang bisa dimanfaatkan dan harus lebih diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Selama ini saya sudah membuka pelatihan pembuatan olahan ikan kepada masyarakat sekitar termasuk istri para nelayan dan sudah ada dua kelompok istri nelayan yang sudah mandiri mengembangkan usahanya, namun kendala mereka adalah modal usaha yang tidak memungkinkan.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara, yang mana untuk mempermudah proses analisa informan dikelompokkan menjadi kelompok regulator, operator, dan pengamat. Temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan data primer menjadi landasan utama dalam penelitian Tesis ini yang juga didukung oleh data sekunder seperti Naskah Akademik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data yang menjadi temuan dan perhatian yang kemudian perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan melakukan kategorisasi secara sistematis, sebelum diberikan makna. Data-data yang menjadi temuan dan perhatian ini akan diuji dengan melakukan pemeriksaan keabsahan dengan melakukan triangulasi terhadap sumber asal data diperoleh.

Implementasi diartikan sebagai suatu kebijakan yang didalamnya terdapat suatu konsepsi program yang mempunyai tujuan tertentu serta ukuran-ukuran pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan, sementara itu kebijakan publik yang dirumuskan dan selenggarakan oleh pemerintah tentu mengandung dampak tertentu terhadap kepentingan publik atau masyarakat. Dalam implementasi program ini terdapat posisi sosial yang membedakan kewenangan dan tanggung jawab antar aktor dalam penelitian ini, maka harus dapat merumuskan terlebih dahulu siapa saja aktor yang terlibat dalam penelitian ini. Apabila ditarik lebih lanjut maka dapat dilihat pihak lain yang dapat berkaitan dengan permasalahan penelitian meskipun hanya sebagai pengamat.

Kemudian peneliti mengkategorikan kelompok instrumen yang berperan dalam objek penelitian, yaitu implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang. Kategori yang dibuat berdasarkan peran dalam konteks penelitian ini adalah; regulator, operator dan pengamat. (1)

Kelompok Regulator, dalam kelompok ini adalah aktor yang secara langsung berperan dalam pembuatan kebijakan/peraturan adalah TNI AL dalam hal ini Spotmar TNI AL; (2) Kelompok Operator, di mana dalam kelompok ini adalah aktor yang terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kelompok Regulator dan sekaligus melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini operator adalah Pangkalan TNI AL Sabang, dan terakhir (3) Kelompok Pengamat, yaitu aktor yang tidak terlibat langsung namun turut memantau dan mengkaji kebijakan dan kegiatan serta memberi masukan kepada Kelompok Regulator dan Operator. Dalam konteks penelitian ini Kelompok Pengamat adalah BNPP, PSDKP Lampulo, Akademisi, Panglima Laot, Komunitas Nelayan dan Pengusaha.

Selanjutnya peneliti akan melakukan Triangulasi terhadap para informan, masing-masing akan memberikan tanggapan peran memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam konteks penelitian. Pengelompokan ini akan menjelaskan siapa berbuat apa, sehingga peneliti dapat melakukan analisis, pengklasifikasian data dengan tepat untuk kemudian dilakukan Kodifikasi data. Adapun kode Narasumber sebagai berikut:

- a. Mayjen TNI Mar Widodo Dwi Purwanto, Asisten Potensi Maritim Kasal
- b. Laksma TNI Halili, S.H., M.H., C.FrA, Asisten Deputi Bidang Kewaspadaan Nasional Kemenkopolhukam
- c. Laksda TNI (Purn) Prof. Dr.Ir. Supartono, M.M., CIQaR
- d. Kolonel Laut (P) Robertus T. Waskito M.M Paban VI Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Spotmar
- e. Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo S.T., M.M. Komandan Lanal Sabang
- f. Letkol Laut (P) Hari Budiman, M.Tr Hanla Pabandya Ketahanan Masyarakat Spotmar

- g. Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Paspotmar Lanal Sabang
- h. Siti Metrianda Akuan, S.T., M.Si Asisten Deputi I Pengelolaan Batas Laut dan Udara BNPP
- i. Willianto P. Siagian, S.Tp Kabid Faslak Talaud BNPP
- j. Basri, A.Pi., M.Si, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo
- k. Mohammad Ali Rani, Panglima Laot Kota Sabang
- l. Azhar Hasyim Komunitas Nelayan
- m. Zulkarnain Komunitas Nelayan
- n. Jutriyus Komunitas Nelayan
- o. Sachriadi komunitas Nelayan
- p. Yuniar Pengusaha Pengolahan Ikan Sabang

4.3.1. Kondisi ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang saat ini.

Kondisi ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang, dengan melihat tanggapan dari informan tentang terjadinya permasalahan keamanan maritim, kemampuan mengatasi gangguan/masalah, kemampuan beradaptasi dan kemampuan bertransformasi seperti tabel berikut:

Tabel 4.2 Triangulasi data

Kondisi ketahanan Masyarakat Pesisir di wilayah Perbatasan Sabang Saat ini		
Sub bagian	Tanggapan Informan	Triangulasi
Regulator Operator dan Pengamat	Terjadinya Permasalahan Keamanan Maritim	e,k, j
	Kemampuan Mengatasi gangguan	k,l,m,n,o
	Kemampuan beradaptasi dengan Lingkungan	l,m,n,o
	Kemampuan Bertransformasi	K,l,m,n,o

Sumber: diolah Peneliti, 2021

4.3.2. Implementasi Program Spotmar TNI AL Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial masyarakat pesisir di wilayah Perbatasan Sabang

Implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial maritim di wilayah perbatasan Sabang dengan melihat terjadinya permasalahan keamanan maritim, komunikasi yang efektif yang menentukan keberhasilan program, Sumber daya manusia yang unggul, anggaran dan peralatan mendukung keberhasilan implementasi program, Adanya Disposisi/kemauan untuk melaksanakan kegiatan, mendukung keberhasilan implementasi program dan Struktur Birokrasi yang efektif mendukung keberhasilan implementasi program sebagaimana tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Triangulasi data

Implementasi Program Spotmar TNI AL Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial masyarakat pesisir di wilayah Perbatasan Sabang		
Sub bagian	Tanggapan Informan	Triangulasi
Regulator Operator dan Pengamat	Terjadinya Permasalahan Keamanan Maritim	a, d, e,f,e,g
	Komunikasi yang efektif menentukan keberhasilan implementasi Program	a,d,f,e
	Sumber daya manusia yang unggul, anggaran dan peralatan mendukung keberhasilan implementasi program	a,d,e,f,g,h,i,
	Adanya Disposisi/kemauan untuk melaksanakan kegiatan, mendukung keberhasilan implementasi program	e,g
	Struktur Birokrasi yang efektif mendukung keberhasilan implementasi program	a,d,e

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

4.3.3 Konsep untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

Konsep percepatan peningkatan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang dengan melihat kerjasama antara tiga aktor terkait (*triplehelix*) yaitu; Pemerintah, Akademi dan Pengusaha seperti tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Triangulasi data

Konsep percepatan Peningkatan Ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang		
Sub bagian	Tanggapan Informan	Triangulasi
Regulator Operator dan Pengamat	Kerjasama masyarakat dengan pemerintah	a,b,j
	Kerjasama dengan Akdemisi	C
	Kerjasama dengan Pengusaha	P

Sumber: diolah Peneliti, 2021

4.4 Hasil Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian diolah melalui pengkategorian yang sistematis, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan. Analisis ini dilakukan peneliti dimaksudkan untuk memberikan makna yang sesuai sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

4.4.1 Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir di wilayah Perbatasan Sabang Saat ini

Permasalahan pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang kondisi Ketahanan Masyarakat di wilayah perbatasan Sabang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti memilah dengan menentukan tiga kategori sesuai dengan indikator-indikator penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk bertransformasi.

4.4.1.1 Kemampuan mengatasi gangguan (*Coping Capacities*)

Dalam menjawab pertanyaan pertama tentang kemampuan mengatasi gangguan (*Coping Capacities*) yaitu kemampuan aktor sosial untuk menyelesaikan segala macam permasalahan dalam hidup mereka. Aktor sosial yang dimaksudkan peneliti dalam hal ini adalah masyarakat nelayan yang terdampak oleh adanya permasalahan keamanan maritim.

Seluruh data terkait dengan kemampuan masyarakat mengatasi gangguan yang didapatkan dari Narasumber seluruhnya memberikan keterangan yang beragam dilihat dari sikap para nelayan yang cenderung memilih untuk berdiam diri dirumah menunggu cuaca membaik ketika terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk melaut, namun ada juga yang memilih untuk tetap melaut meskipun cuaca sedang tidak bersahabat dengan mencari celah lokasi yang tenang gelombang lautnya namun kecenderungan nelayan untuk memilih untuk berdiam diri dirumah menunggu cuaca membaik hal ini dikarenakan nelayan hanya bergantung kepada hasil melaut sebagai sumber mata pencaharian utama mereka.

Demikian juga dengan permasalahan penyelundupan narkoba yang pernah terjadi berdasarkan informasi nelayan selaku narasumber juga beragam sebagian kecil nelayan mengatakan kejadian semacam ini mereka laporkan kepada Panglima Laot namun sebagian besar masyarakat memilih untuk diam karena takut dengan ancaman para sindikat pelaku penyelundupan narkoba di daerah mereka.

Mengatasi gangguan yang terjadi dalam kehidupan sehari hari sebagai wujud interaksi individu dengan individu ataupun dengan kelompok

dalam suatu komunitas sosial yang dalam hal ini adalah nelayan di wilayah perbatasan Sabang, dapat dikatakan mampu jika mereka dapat menelaraskan antara kehidupan riil dengan banyaknya permasalahan keamanan maritim yang khas terjadi di wilayah perbatasan.

Memahami tentang kondisi perbatasan yang rawan akan permasalahan keamanan maritim yang sewaktu waktu dimungkinkan terjadi, maka diperlukan kewaspadaan yang tinggi guna mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi lagi dan tindakan apa yang harus dipersiapkan menjadi hal yang penting untuk dipahami. Dalam hal mampu ini masyarakat dinilai kurang mampu mengatasi banyaknya gangguan terbukti dengan kondisi perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi setiap saat masyarakat tetap bergantung pada satu mata pencaharian yaitu sebagai nelayan saja tanpa ada alternatif pekerjaan lain, jika kondisi laut tidak memungkinkan juga terbukti dengan tetap maraknya kejahatan diperaian mereka.

4.2.1.2. Kemampuan Menyesuaikan diri (*Adaptive Capacities*)

Guna menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu tentang *Adaptive Capacities* yaitu Kemampuan untuk belajar dari masa lalu dan kemudian mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Kompleksnya permasalahan keamanan maritim yang terjadi di wilayah Sabang sebagai wilayah perbatasan sehingga masyarakat diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa perwakilan nelayan di wilayah ini mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, mereka berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi adalah hal yang biasa atau hal yang rutin terjadi seperti adanya perubahan cuaca dan mayoritas nelayan memilih untuk berdiam diri menunggu cuaca membaik, demikian halnya dengan permasalahan lain yang seringkali terjadi seperti adanya konflik antar nelayan, yang dipicu akibat perbedaan persepsi tentang wilayah tangkap

mereka yang dimana pihak saling mengklaim bahwa area tangkap mereka sudah sesuai dengan aturan, namun di satu pihak mengatakan bahwa mereka menyalahi aturan yang telah disepakati sehingga konflik antar nelayan wilayah ini terus berlanjut dan terulang kembali.

Memahami tentang kondisi perbatasan yang rawan akan permasalahan keamanan maritim yang sewaktu waktu dimungkinkan terjadi, maka diperlukan kewaspadaan yang tinggi guna mengantisipasi permasalahan akan terjadi lagi dan tindakan apa yang harus dipersiapkan menjadi hal yang penting untuk dipahami. Terjadinya permasalahan di wilayah ini secara rutin dan berulang menunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan mereka.

4.4.1.3 Kemampuan untuk bertransformasi (*Transformative Capacities*)

Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang kemampuan untuk bertransformasi yang merupakan kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah ataupun lembaga lainnya yang dapat mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat.

Beberapa narasumber memberikan jawaban bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah baik lembaga pemerintahan maupun swasta, untuk dapatnya mereka bekerjasama mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat nelayan melalui peran Panglima Laot, yang memang selama ini dipercaya oleh seluruh instansi pemerintahan maupun lembaga swasta untuk menyelesaikan permasalahan nelayan di wilayah mereka masing-masing. Hal ini terbukti dengan banyaknya perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan berupa kapal dibawah 3GT ataupun kapal 5 GT untuk nelayan tradisional, bantuan lain juga berupa alat tangkap seperti pancing, jala dan peralatan selam, demikian juga dengan pihak nelayan yang diwakili oleh Panglima Laot juga selalu berkoordinasi melalui berbagai macam forum untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan nelayan di wilayah ini.

Memahami tentang kondisi perbatasan yang rawan akan permasalahan keamanan maritim yang sewaktu waktu dimungkinkan terjadi, maka diperlukan kewaspadaan yang tinggi guna mengantisipasi permasalahan akan terjadi lagi dan tindakan apa yang harus dipersiapkan menjadi hal yang penting untuk dipahami. Terjalannya hubungan yang dinamis antara pemerintah dengan masyarakat menunjukkan adanya kemampuan bertransformasi kearah perubahan yang positif yang baik pada masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang.

4.4.2 Implementasi Proqram Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan Sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

Implementasi diartikan sebagai suatu kebijakan yang didalamnya terdapat suatu konsepsi program yang mempunyai tujuan tertentu serta ukuran-ukuran pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan, sementara itu kebijakan publik yang dirumuskan dan selenggarakan oleh pemerintah tentu mengandung dampak tertentu terhadap kepentingan publik atau masyarakat. Program kegiatan Spotmar akan dilaksanakan oleh Satuan TNI AL ditingkat bawah yaitu Satkowil dan Satnonkowil. Para penentu kebijakan ini memiliki kewenangan (*power*) untuk menentukan tujuan-tujuan tertentu serta merumuskan cara untuk mencapai tujuan. faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain akan dianalisis melalui beberapa faktor yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

4.4.2.1 Komunikasi

Pada pertanyaan kedua tentang implementasi program Spotmar TNI AL di wilayah pebatasan Sabang ini, permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang faktor komunikasi yang diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan Spotmar TNI AL ini perlu disampaikan

kepada pelaku kebijakan dalam hal ini Lanal Sabang selaku operator, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Seluruh data terkait dengan kegiatan di bidang potensi maritim yang didapat dari Narasumber memberikan keterangan yang sama dari sisi komunikasi bahwa komunikasi yang dijalankan selama ini sudah sesuai prosedur dimana ada komunikasi yang baik antara satuan ditingkat pusat selaku regulator kepada Lanal Sabang selaku operator di tingkat Satkowil. Komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi ini sangat diperlukan guna menentukan berlangsungnya suatu kerjasama yang baik antara satuan ditingkat pusat dalam hal ini Spotmar TNI AL dengan satuan ditingkat daerah dalam hal ini Lanal Sabang. Terlebih lagi di lingkungan TNI yang sangat menerapkan hierarki yang jelas, apabila pimpinan menginstruksikan maka bawahan secara otomatis berkewajiban untuk merespon dengan positif. Spotmar dalam hal ini akan menerbitkan direktif yang berisi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan ditingkat bawah untuk melaksanakan program kemudian selesai satuan yang melaksanakan kegiatan akan melaporkan hasil kegiatan kepada Spotmar TNI AL.

Terkait dengan Program Spotmar TNI AL dengan beberapa program unggulannya yaitu dibidang Pembinaan kemampuan Potensi Maritim (Binpuanpotmar) dengan program penataran kemampuan potensi maritim kepada prajurit TNI AL, kemudian dibidang komunikasi sosial maritim (Komsosmar) dengan program komunikasi sosial dengan komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut, selanjutnya adalah bidang pembinaan ketahanan wilayah maritim (Bintahwilmar), bidang bakti TNI AL dengan program bersih pantai dalam rangka hari dharma samudera dan bidang pembinaan wilayah pertahanan laut (Binwiltasla) dengan program peningkatan wawasan kebangsaan di wilayah kerja Lanal Sabang terkait dengan penguatan dan pemberdayaan

wilayah. Program ini dimaksudkan guna menyiapkan Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

Program Spotmar yang telah diimplementasikan kepada Lanal Sabang sebagai wilayah perbatasan yang dikatakan dalam pembahasan sebelumnya memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi sesuai peta kerawanan Lanal Sabang dengan munculnya permasalahan keamanan maritim seperti kasus imigran gelap, penyelundupan narkoba, konflik antar nelayan, ilegal fishing, perubahan cuaca sehingga diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung implementasi program tersebut salah satunya yaitu dengan menerapkan komunikasi yang efektif agar tercapai tujuan yang diharapkan.

4.4.2.2 Sumber Daya

Pada pertanyaan kedua tentang implementasi program Spotmar TNI AL di wilayah perbatasan Sabang ini, permasalahan selanjutnya yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang faktor Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumberdaya peralatan yang berupa sarana dan prasarana yang ada guna menunjang program kegiatan. Manusia merupakan faktor penting akan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan program yang dilaksanakan. Sumber Daya manusia yang dimaksudkan disini adalah personel TNI AL yang melaksanakan kegiatan program.

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Narasumber yang diwawancarai memberikan keterangan bahwa Personel Potmar yang ada di Satkowil dan Satnonkowil masih belum dapat terpenuhi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), secara keseluruhan jumlah personel Potmar yang ada baru terpenuhi kurang lebih 44 % dari jumlah DSP. Hal ini disebabkan keterbatasan personel yang ada di Satkowil dan

Satnonkowi sehingga keterisian personel terbagi pada tiap-tiap bagian pada satker tersebut termasuk pada Staf Potmar. Namun demikian kekosongan tersebut dapat teratasi dengan memaksimalkan personel yang ada dan rangkap jabatan dari perwira yang berada pada satker tersebut. Dalam rangka meningkatkan Profesionalisme dalam bidang Potmar, Saat ini Spotmaral dan Dispotmaral secara rutin dan berkesinambungan melaksanakan kegiatan kursus/penataran kemampuan Potmar kepada personel yang ada di Satkowi dan Satnonkowi untuk meningkatkan kemampuan prajurit sebagai Insan Pembina Potensi Maritim.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah perbatasan ini Lanal Sabang memang sangat membutuhkan personel yang memiliki kualifikasi di bidang potensi maritim, walaupun sudah ada personel yang telah mengikuti kursus ataupun penataran namun jumlahnya belum signifikan untuk menangani permasalahan di wilayah Sabang mengingat luasnya wilayah kerja Lanal Sabang.

Dilihat dari sisi peralatan dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang ada, sebagaimana hasil wawancara terhadap beberapa Narasumber ditemukan data bahwa faktor sarana pada umumnya masih memprihatinkan dari berbagai segi. Daerah- daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi, panjangnya garis perbatasan baik di daratan maupun lautan sangat sulit untuk diawasi oleh aparat keamanan. Akibatnya pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lintas batas lainnya seringkali terjadi. Bahkan ada wilayah perbatasan yang langsung berbatasan langsung dengan negara lain dengan kondisi suatu rumah warga berada di dua negara sekaligus dan hal ini tentunya memerlukan penanganan yang intensif. Demikian juga dengan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan Indonesia selain itu kondisi transportasi antar wilayah di perbatasan cenderung belum bisa dijadikan penopang kegiatan ekonomi masyarakat, ini juga dikarenakan minimnya sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi darat, baik berupa jalan, jembatan maupun kendaraan relatif sedikit. Hal inilah

yang seringkali menjadikan kendala dalam pelaksanaan program Spotmar TNI AL.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan Seperti halnya Lanal Sabang yang memiliki Alutsista terbatas yang ditempatkan di Posal-Posal yang ada yaitu *Legend AIS*, Radar, LRC, PAT I 1-32, *Rubber Boad*, *Spped Fiberglass*, dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dihadapkan juga dengan kondisi luasnya wilayah kerja Lanal Sabang dengan unsur Jenis KAL dan Sea Rider yang dimiliki Lanal dengan kondisi siap terbatas. Kondisi sarana dan prasarana yang siap terbatas ini dihadapkan dengan panjang garis batas yang harus diawasi, hal inilah yang nantinya akan memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti halnya yang terjadi di wilayah Sabang.

Wilayah perbatasan terutama Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang menjadi prioritas pengelolaan perbatasan termasuk 12 Pulau kecil yang yang dikategorikan rawan, tidak berpenghuni, akan dikoordinasikan untuk kerjasama dengan pihak TNI untuk dijaga oleh anggota Satuan Tugas pulau terluar kemudian didata kebutuhan apa yang mereka butuhkan sehingga pulau tersebut layak untuk dihuni oleh para anggota Satgas TNI seperti kebutuhan air bersih, kebutuhan tower jaringan komunikasi dan akses jalan dan hal ini BNPP akan koordinasikan dengan yaitu dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan ataupun kementerian terkait lainnya. Demikian juga dengan Anggaran merupakan faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. keterbatasan anggaran menyebabkan program juga tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

Sebagaimana hasil wawancara terhadap beberapa Narasumber ditemukan data bahwa anggaran Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla). Kewenangan yang diberikan Spotmar TNI AL selaku Regulator kepada Pelaksana kebijakan (Operator) demikian halnya dengan

kegiatan di Satkowil maupun Satnonkowil melaksanakan kegiatan terkait dengan program berdasarkan direktif yang telah diterbitkan oleh Spotmar TNI AL dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan sepenuhnya oleh Lanal Sabang yang anggarannya diterima melalui DIPA daerah.

Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Lanal Sabang dalam upaya pembinaan potensi maritim selama ini yang meliputi komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan bakti TNI AL telah terlaksana sesuai instruksi dari komando atas dalam hal ini Spotmar TNI AL dan sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut berasal dari anggaran Spotmar Mabasal dan sinergi dengan instansi terkait.

4.4.2.4 Disposisi

Pertanyaan tentang implementasi program Spotmar TNI AL di wilayah perbatasan Sabang ini, akan dibahas adalah permasalahan tentang faktor disposisi, dimana faktor ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan disposisi ini dilihat ketika melaksanakan program Spotmar TNI AL selama ini sudah berjalan dengan baik dari mulai kegiatan penataran kemampuan potensi maritim, komunikasi sosial maritim dengan sosialisasi dengan komponen pemerintah maupun komponen masyarakat, adanya pembinaan ketahanan wilayah dengan melaksanakan program ketahanan pangan budidaya rumput laut untuk mengedukasi masyarakat menghasilkan penghasilan tambahan, ada juga kegiatan bersih pantai dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada para siswa setingkat SMA agar menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lanal Sabang membentuk panitia internal agar dapat dilaksanakan secara optimal serta jelas siapa berbuat apa dan

masing-masing personel yang ditunjuk akan bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya secara sungguh-sungguh. Selesai kegiatan akan ada laporan pelaksanaannya kepada Spotmar TNI AL untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.3.2.4 Struktur Birokrasi

Pertanyaan tentang implementasi program Spotmar TNI AL di wilayah perbatasan Sabang ini, akan dibahas adalah permasalahan tentang faktor Struktur birokrasi, dimana faktor ini identik dengan pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

Struktur birokrasi mempunyai kewenangan pada kerjasama dalam suatu organisasi dari data hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya struktur birokrasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi program ini, pelaksanaan program kegiatannya Spotmar TNI AL memiliki struktur birokrasi yang jelas baik mandiri maupun terpadu. Kasal sebagai penanggung jawab kegiatan potensi maritim yang di delegasikan kepada Aspotmar Kasal dan Kadispotmaral sebelumnya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, kemudian program ini di dilaksanakan oleh Satkowil ataupun Satnonkowil TNI AL baik ditingkat Armada, Lantamal maupun Lanal dengan melibatkan pemerintah daerah ataupun instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan untuk Lanal Sabang maka sebelumnya program ini sudah menjadi pembahasan yang matang pada tingkat pimpinan dalam hal ini Kasal yang telah disetujui kemudian dikoordinasikan juga dengan kementerian dan lembaga terkait Aspotmar Kasal selaku penanggung jawab akan menginstruksikan jajaran dibawahnya baik Satkowil maupun Satnonkowil.

Demikian halnya dengan Lanal Sabang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim, memiliki prosedur birokrasi secara

hierarkis dari tingkat Mabes TNI AL dalam hal direktif Kasal. Komandan Lantamal I Belawan selaku penanggung jawab kegiatan tentunya akan berkoordinasi dengan Aspotmar Danlantamal, kemudian untuk mempermudah pelaksanaan program akan membentuk panitia internal Lanal untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

4.4.3. Konsep untuk meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah Perbatasan Sabang

Guna menjawab pertanyaan penelitian ketiga tentang konsep mempercepat peningkatan ketahanan masyarakat pesisir, pada penelitian ini peneliti menggunakan Konsep *Triplehelix*, merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari tiga aktor yaitu akademik, pebisnis dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan.

Beberapa Narasumber yang diwawancarai tentang pemahaman konsep ini sangat beragam sesuai dengan sudut pandang sesuai dan profesi masing-masing dan sejauh mana mereka dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ketahanan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Sabang. Mereka berpendapat bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir perbatasan negara relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial antar masyarakat, kurangnya pengawasan dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus dijaga mengakibatkan timbulnya kegiatan ilegal di daerah perbatasan dan apabila tidak diantisipasi sejak dini maka dikhawatirkan akan menjadikan berbagai kerentanan sosial.

Sabang memiliki potensi perikanan seperti kakap, kerapu, dan gurita yang memiliki nilai ekonomis penting yang ada di Kota Sabang dan Aceh ini dan menjadi salah satu komoditi ekspor, upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi biru salah satu kuliner khas yang

biasanya disajikan dalam bentuk sate gurita, sehingga Sabang ini memiliki potensi untuk dikembangkan dibidang kelautan wisata bahari yang sangat menjajikan.

Masyarakat nelayan di sekitar Sabang ini dimana mereka memiliki solidaritas yang cukup tinggi, mereka saling bantu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan berat secara bersama-sama, kemudian mereka juga memiliki kesadaran untuk saling membantu sesamanya dan hal ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya keterikatan emosioanal dan adanya rasa saling membutuhkan dalam jiwa kenelayannya. Rasa kebersamaan ini merupakan suatu potensi yang bisa dimanfaatkan dan harus lebih diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Selama ini sudah seringkali di laksanakan pelatihan pembuatan olahan ikan kepada masyarakat sekitar termasuk istri para nelayan dan sudah ada dua kelompok istri nelayan yang sudah mandiri mengembangkan usahanya, namun kendala mereka terletak pada modal usaha yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan usaha mereka. Adapun peneliti menggunakan model *Triplehelix* yaitu kerjasama antara pemerintah, akademisi dan pengusaha, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.4.3.1. Pemerintah

Pertanyaan tentang konsep percepatan peningkatan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang, akan dibahas adalah dari perspektif peran aktor dalam model *triplehelix* yaitu pemerintah, dimana model helix ini merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan kerjasama yang melibatkan aktor akademik, pengusaha dan pemerintah, dan peran pemerintah ini untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan, yang dimaksudkan adanya kontrol pemerintah kepada akademisi dan industri/pengusaha.

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk melaksanakan program dalam rangka mendorong kesejahteraan rakyat salah satunya

adalah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo dengan Konsep ekonomi biru, yang ditawarkan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan pariwisata bahari dan pesisir untuk memberikan kontribusi dalam menjadikan pencapaian ekonomi kelautan berkelanjutan. Demikian juga dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan melakukan pencegahan eksploitasi yang berlebihan yang memungkinkan untuk terjadinya kerusakan ekosistem laut, hal ini dilakukan melalui pengawasan wilayah laut terhadap alat tangkap perikanan yang dinilai tidak ramah lingkungan. Dimaksudkan agar tercipta perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

Disamping itu adanya peran serta dari Spotmar TNI AL selaku regulator dengan beberapa programnya di wilayah perbatasan yang dilaksanakan oleh pihak operator, yakni Lanal Sabang selaku satuan komando wilayah juga telah berupaya melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim. Pembinaan Kemampuan Potensi Maritim melalui Penataran Kemampuan Potensi Maritim Tersebar di tingkat Lanal, Komunikasi Sosial Maritim melalui kegiatan komunikasi dengan komponen masyarakat, Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim dengan melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kampung Bahari Nusantara, Bakti TNI AL dengan melaksanakan kegiatan bersih pantai bersama masyarakat sekitar dan aparat pemerintah kota Sabang, Pembinaan wilayah perbatasan laut dengan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bersama siswa siswi setingkat SMU di wilayah Kota Sabang dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di wilayah kerja Lanal Sabang terkait dengan penguatan dan pemberdayaan wilayah. Program ini dimaksudkan guna menyiapkan Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

4.4.3.2 Akademik

Pertanyaan tentang konsep percepatan peningkatan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang, akan dibahas adalah dari perspektif peran aktor kedua dalam model *triplehelix* yaitu Akademik, dimana model helix ini merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan kerjasama yang melibatkan aktor akademik, pengusaha dan pemerintah, dan peran Akademisi ini untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan, intelektual (tim ahli dari kalangan akademisi dan publik), perkembangan selanjutnya yang diharapkan adalah terciptanya ekonomi kreatif.

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda Sabang menjadi pintu masuk dari ujung barat menuju Indonesia lewat jalur laut dengan pelabuhan bebasnya, Adanya situs-situs bersejarah pada zaman kerajaan sangat menarik wisatawan untuk berkunjung dan beberapa wisata bahari yang harus dikembangkan menjadi daya tarik Sabang dari sisi Pariwisata. Jika dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan Sabang relatif masih kurang memadai, fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah dengan satu universitas swasta hingga siswa cenderung memilih untuk ke melanjutkan pendidikan ke Banda Aceh. Sehingga perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai serta memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Melihat situasi Sabang yang merupakan negara yang berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand dan India tentunya menjadi sangat rentan terhadap berbagai gangguan keamanan maritim, demikian juga dengan masyarakat yang terdampak yaitu nelayan yang memang sangat menggantungkan hidupnya dari hasil laut sehingga perlu adanya sinergi pemerintah daerah dengan stakeholder terkait termasuk pihak akademisi dan swasta untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar memiliki jiwa nasionalisme yang kuat sehingga akan memperkuat wilayah perbatasan .

Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau Pulau Kecil Terluar wilayah Sabang relative lebih mudah dan menjanjikan dibandingkan

dengan wilayah-wilayah perbatasan lainnya, dilihat dari segi Geografi, Demografi dan kondisi sosial nya. Namun ketahanan sosial masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan dari sisi sarana prasarana para nelayan dan petani yang masih sangat sederhana dan tradisional. Sarana prasarana Pangkalan TNI AL perlu ditingkatkan, seperti banyaknya Gedung gedung yang rusak dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) belum berfungsi secara optimal yang nantinya dapat membantu pembinaan wilayah perbatasan Indonesia barat, khususnya wilayah Sabang dan pulau pulau sekitarnya.

Jika dilihat dari indikator SDM dan Sarpras yang ada dalam kegiatan pembinaan wilayah perbatasan laut dan PPKT, upaya untuk meningkatkan indikator tersebut adalah Negara harus hadir di tengah tengah masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan aparat terkait hadir dan merangkul semua lapisan masyarakat bersama sama meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembinaan wilayah perbatasan, sehingga dapat mengali sumber daya alam secara maksiamal demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat wilayah perbatasan sabang.

4.4.3.3 Pengusaha

Pertanyaan tentang konsep percepatan peningkatan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang, akan dibahas adalah dari perspektif peran aktor ketiga dalam model *triplehelix* yaitu pengusaha, dimana model helix ini merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan kerjasama yang melibatkan aktor akademik, pengusaha dan pemerintah, dan peran Pengusaha ini untuk melahirkan berbagai inovasi yang memiliki potensi untuk ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis sehingga para pengusaha ini diharapkan ikut memberi pengaruh signifikan bagi dinamika interaksi antara ketiga aktor dalam model *helix* ini.

Masyarakat nelayan memiliki solidaritas yang cukup tinggi, mereka saling bantu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan berat secara bersama-sama, kemudian kesadaran untuk saling membantu sesamanya ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya keterikatan emosional dan adanya rasa saling membutuhkan dalam jiwa kenelayannya. Rasa kebersamaan ini merupakan suatu potensi yang bisa dimanfaatkan dan harus lebih diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Peran pengusaha dalam hal ini telah membuka pelatihan pembuatan olahan ikan kepada masyarakat sekitar termasuk istri para nelayan dan sudah ada dua kelompok istri nelayan yang sudah mandiri mengembangkan usahanya.

4.5 Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang tersaji maka tahap selanjutnya peneliti akan menggabungkan dengan beberapa kriteria untuk memperoleh jawaban guna menilai implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang. Serangkaian jawaban nantinya diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan kategori data yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya.

4.5.1. Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat pesisir di Wilayah Perbatasan Sabang Saat ini

Penelitian lebih lanjut perlu diarahkan untuk mendapatkan jawaban dalam mencari pola baru metode Implementasi program dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan sehingga dapat mengefektifkan program Spotmar TNI AL dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah perbatasan.

4.5.1.1. Kemampuan mengatasi gangguan (*Coping Capacities*)

Kemampuan mengatasi gangguan dalam hal ini mengarah kepada permasalahan keamanan maritim yang seringkali terjadi di wilayah perbatasan Sabang. Sesuai peta kerawanan Lanal Sabang menyebutkan bahwa menurut hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kelompok nelayan kurang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan hidupnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang cenderung berdiam diri ketika terjadi cuaca buruk di wilayah perairan mereka dan tidak memiliki aktivitas lain sebagai alternatif mata pencaharian mereka selain menjadi nelayan, masyarakat cenderung ikut terlibat konflik antar nelayan dan melakukan pelanggaran batas wilayah di negara yang akhirnya seringkali terjadi penangkapan nelayan lokal di Malaysia, Thailand dan India. Kurang adanya pemahaman masyarakat bahwa tentang kreatifitas mengembangkan potensi sumber daya yang ada sehingga nantinya dapat menghasilkan penghasilan tambahan diluar penghasilan sebagai nelayan. Selain itu juga kurangnya pemahaman dibidang hukum tentang pelanggaran batas wilayah negara.

Satu kondisi sosial di sebuah masyarakat bisa disebut masalah sosial sementara di masyarakat lainnya tidak dianggap masalah sosial. Begitu juga dengan dimensi persepsi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu mempengaruhi bentuk masalah sosial sehingga satu fenomena sosial yang dianggap masalah pada masa lalu saat ini tidak lagi dianggap sebagai masalah sosial dan begitu pula sebaliknya. Masalah sosial dapat dipicu oleh satu atau beberapa penyebab yang dianggap mengganggu. Jika orang tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan akibat gangguan ini, atau tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan yang tiba-tiba, maka ia akan mengalami masalah. Jika orang tidak bisa keluar dari masalahnya, maka kondisi ini dapat memunculkan efek dalam bentuk masalah berikutnya.

Penanganan masalah sosial tidak akan berhasil dengan baik jika kita hanya bersikap pasif terhadap berbagai kondisi sosial yang buruk yang bisa

kita lihat dan hanya mengandalkan kinerja pemerintah atau negara untuk menyelesaikannya. Menurut perspektif pekerjaan sosial, ada dua bentuk keadaan berkaitan dengan fungsionalitas sosial. Pertama, adalah keadaan berfungsi sosial atau *adaptive social functioning*. Ini ditunjukkan dengan kemampuan orang, organisasi, atau lembaga lembaga menggunakan sumber-sumber personal, interpersonal, serta sumber-sumber kelembagaan lain untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhannya. Kemudian sumber-sumber tersebut secara relatif tersedia dan dapat diakses (DuBois&Miley, 2005:14) Partisipasi masyarakat secara luas perlu dibangun agar bisa terlibat dalam aksi-aksi sosial sehingga ada sinergi antara upaya pemerintah di satu sisi dengan kekuatan masyarakat di sisi lain. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki kondisi sosial dapat sekaligus memiliki dampak positif yakni munculnya kekuatan-kekuatan yang berbasis partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sendiri untuk bisa lebih kreatif dan mandiri terhadap faktor-faktor penyebab munculnya masalah sosial sehingga diharapkan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi bisa menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik.

4.5.1.2. Kemampuan menyesuaikan diri (*Adaptive Capacities*)

Simpulan yang dapat peneliti tarik tentang kemampuan menyesuaikan diri dalam ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan kurang memiliki kemampuan dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa wilayah Sabang banyak terjadi permasalahan keamanan maritim seperti yang terbaca pada peta kerawanan Lanal Sabang yaitu adanya perubahan cuaca, imigran gelap, illegal fishing, konflik antar nelayan dan penyelundupan narkoba, hal ini terbukti dari respon masyarakat yang cenderung mengeluhkan kondisi yang kurang bersahabat dengan aktivitas mereka sehari-hari.

Hal ini menunjukkan adanya kerentanan sosial yang terjadi dalam masyarakat nelayan di wilayah Perbatasan Sabang. Kurang adanya pemahaman masyarakat tentang persepsi batas wilayah tangkap serta ada ego sektoral yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya perikanan sehingga terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan dengan merusak ekosistem laut dan terumbu karang sebagai sarana perkembangbiakan ikan.

Setiap individu yang hidup di dalam masyarakat. Tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang mereka patuhi, demi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial. (Hurlock,1990). Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain.

Penyesuaian sosial yang memungkinkan individu untuk mencapai penyesuaian pribadi dan sosial dengan cukup baik. Proses berikutnya yang harus dilakukan individu dalam penyesuaian sosial adalah kemauan untuk mematuhi norma-norma dan peraturan sosial kemasyarakatan. Setiap masyarakat biasanya memiliki aturan yang tersusun dengan sejumlah ketentuan dan norma atau nilai nilai tertentu yang mengatur hubungan individu dengan kelompok. Demikian juga dengan proses menyesuaikan diri masyarakat pesisir Sabang dalam menghadapi berbagai macam gangguan, dengan adanya penyesuaian sosial diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

4.5.1.2. Kemampuan Bertransformasi (*Adaptive Capacities*)

Kemampuan bertransformasi disini mengarah kepada kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah ataupun lembaga lainnya

yang dapat mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. Sesuai dengan analisis yang telah dibahas sebelumnya masyarakat nelayan di wilayah perbatasan Sabang telah terjalin kerjasama yang baik antara pihak pemerintah baik lembaga pemerintahan maupun swasta dengan masyarakat nelayan untuk mendorong kesejahteraan dan ketahanan masyarakat nelayan melalui peran Panglima Laot yang memang selama ini dipercaya oleh seluruh instansi pemerintahan maupun lembaga swasta untuk menyelesaikan permasalahan nelayan. Terjalannya hubungan yang dinamis antara pemerintah dengan masyarakat menunjukkan adanya kemampuan bertransformasi yang baik pada masyarakat di wilayah perbatasan Sabang.

Pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*ekuilibrium*) hubungan sosial bahwa perubahan itu juga terjadi di masyarakat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi, terganggunya keseimbangan hidup masyarakat. Namun adanya bantuan alat tangkap ikan tradisional yang diberikan pemerintah kepada para nelayan menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, meskipun kebutuhan nelayan tidak seluruhnya dapat diakomodir sesuai keinginan mereka namun secara umum bantuan pemerintah ini sudah dapat memenuhi sekitar 60% dari kebutuhan nelayan.

4.5.2. Implementasi Proqram Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

4.5.2.1 Komunikasi

Simpulan yang dapat peneliti tarik tentang implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang dilihat dari faktor komunikasi bahwa yang dijalankan selama ini sudah sesuai prosedur dimana ada komunikasi yang baik antara satuan ditingkat pusat selaku regulator kepada Lanal Sabang selaku operator di tingkat Satkowil. komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi ini sangat diperlukan guna menentukan berlangsungnya suatu kerjasama yang baik antara satuan ditingkat pusat dalam hal ini Spotmar TNI AL dengan satuan ditingkat daerah dalam hal ini Lanal Sabang.

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi yang menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (pihak operator), Maka diperlukan penyampaian komunikasi yang efektif kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara keduanya ini mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien sehingga diperlukan kebijakan yang diambil agar tidak simpang siur dan akan membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

4.5.2.2 Sumber Daya

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia dalam hal ini Personel Potmar yang ada di Satkowil dan Satnonkowil masih belum dapat terpenuhi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) secara

keseluruhan jumlah personel Potmar yang ada baru terpenuhi kurang lebih 44 % karena keterbatasan personel yang ada di Satkowil dan Satnonkowil. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah perbatasan khususnya Sabang, sangat membutuhkan personel yang memiliki kualifikasi di bidang potensi maritim, walaupun sudah ada personel yang telah mengikuti kursus ataupun penataran namun jumlahnya belum signifikan untuk menangani permasalahan di wilayah Sabang mengingat luasnya wilayah kerja Lanal Sabang.

Sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Demikian halnya dengan implementasi program Spotmar TNI AL faktor Sumber daya manusia akan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan program yang dilaksanakan. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah personel TNI AL yang melaksanakan kegiatan program.

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang digunakan untuk memudahkan dan memberikan pelayanan operasionalisasi implementasi suatu program kebijakan. kondisi transportasi antar wilayah di perbatasan cenderung belum bisa dijadikan penopang kegiatan ekonomi masyarakat, ini juga dikarenakan minimnya sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi darat, baik berupa jalan, jembatan maupun kendaraan relatif sedikit. Hal inilah yang seringkali menjadikan kendala dalam pelaksanaan program Spotmar.

Demikian juga dengan sarana prasarana para nelayan dan petani yang masih sangat sederhana dan tradisional. Sarana prasarana Pangkalan TNI AL perlu ditingkatkan, seperti banyaknya Gedung gedung yang rusak dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) belum berfungsi secara optimal yang nantinya dapat membantu pembinaan wilayah perbatasan Indonesia barat, khususnya wilayah Sabang dan pulau pulau sekitarnya.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan Seperti halnya Lanal Sabang yang memiliki Alutsista terbatas yang ditempatkan di Posal-Posal yang ada yaitu *Legend AIS*, Radar, LRC, PAT I 1-32, *Rubber Boad*, *Spped Fiberglass*, dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dihadapkan juga dengan kondisi luasnya wilayah kerja Lanal Sabang dengan unsur Jenis KAL dan Sea Rider yang dimiliki Lanal dinilai kurang memadai dengan kondisi siap terbatas. Hal ini masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan, sarana serta prasarana dihadapkan dengan panjang garis batas yang harus diawasi, hal inilah yang nantinya akan memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti halnya yang terjadi di wilayah Sabang.

Terkait dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program Spotmar ini didukung dari anggaran pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla). Sedangkan kewenangan yang diberikan Spotmar TNI AL selaku regulator kepada satuan pelaksana (operator) atau Satkowil dan Satnonkowil dalam hal ini Lanal Sabang, dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan program pembinaan wilayah perbatasan berdasarkan direktif Kasal yang telah diterbitkan oleh Spotmar TNI AL. Anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping itu program juga tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, apabila ada keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kegiatan yang dilaksanakan di Lanal Sabang dalam upaya pembinaan potensi maritim selama ini yang meliputi komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan bakti TNI AL telah terlaksana sesuai instruksi dari komando atas dalam hal ini Spotmar TNI AL dan sumber

anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut berasal dari anggaran Spotmar TNI AL dan sinergi dengan instansi terkait.

4.5.2.3 Disposisi

Disposisi ini dilihat ketika melaksanakan program Spotmar TNI AL selama ini sudah berjalan dengan baik dari mulai kegiatan penataran kemampuan potensi maritim, komunikasi sosial maritim dengan sosialisasi dengan komponen pemerintah maupun komponen masyarakat, adanya pembinaan ketahanan wilayah dengan melaksanakan program ketahanan pangan budidaya rumput laut untuk mengedukasi masyarakat menghasilkan penghasilan tambahan, ada juga kegiatan bersih pantai dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada para siswa setingkat SMA agar menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lanal Sabang membentuk panitia internal agar dapat dilaksanakan secara optimal serta jelas siapa berbuat apa dan masing-masing personel yang ditunjuk akan bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya secara sungguh-sungguh. Selesai kegiatan akan ada laporan pelaksanaannya kepada Spotmar TNI AL untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam hal kemauan ini memiliki makna suatu aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan yang menjadi titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. Selanjutnya jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (pihak operator) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adapun faktor-faktor yang menjadi perhatian dimana disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan

personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, Salah satu teknik untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

4.5.2.5 Struktur Birokrasi

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pelaksanaan program kegiatannya Spotmar TNI AL memiliki struktur birokrasi yang jelas baik mandiri maupun terpadu. Kasal sebagai penanggung jawab kegiatan yang di delegasikan kepada Aspotmar Kasal dan Kadispotmaral sebelumnya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, kemudian program ini di dilaksanakan oleh Satkowil ataupun Satnonkowil TNI AL baik ditingkat Armada, Lantamal maupun Lanal dengan melibatkan pemerintah daerah ataupun instansi terkait.

Struktur birokrasi ini diartikan sebagai pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya dimana birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi program yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Lanal Sabang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim memiliki prosedur birokrasi secara hierarkis dari tingkat Mabes TNI AL melalui direktif Kasal. Komandan Lantamal I Belawan selaku penanggung jawab kegiatan akan berkoordinasi dengan Aspotmar Danlantamal, kemudian untuk mempermudah pelaksanaan program akan membentuk panitia internal Lanal untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan cukup pelaksana (pihak operator) dalam hal ini Lanal Sabang mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, sedangkan implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi, untuk itu diperlukan aspek

aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi.

4.5.3. Konsep untuk meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah Perbatasan Sabang

4.5.3.1. Pemerintah

Sabang merupakan memiliki potensi perikanan seperti kakap, kerapu, dan gurita jenis ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang biasa hidup di zona demersal, di dasar laut atau danau. Jenis ikan ini merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis penting yang ada di Kota Sabang dan Aceh ini, sedangkan jenis ikan gurita saat ini telah menjadi salah satu komoditi ekspor dan juga dimintai banyak negara seperti Eropa, China, dan negara-negara lainnya. Banyaknya permintaan dihadapkan pada persediaan ikan yang semakin menipis sehingga diperlukan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi biru meningkat wilayah Sabang ini gurita menjadi salah satu kuliner khas yang biasanya disajikan dalam bentuk sate gurita, sehingga Sabang ini memiliki potensi untuk dikembangkan dibidang kelautan wisata bahari sang sangat menjajikan.

Konsep ekonomi biru yang ditawarkan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan pariwisata bahari dan pesisir semata melainkan kegiatan perikanan tangkap turut sera memberikan kontribusi dalam menjadikan pencapaian ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Demikian juga dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lamulo selama ini ikut berperan dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan melakukan pencegahan eksplitasi yang berlebihan yang memungkinkan untuk terjadinya kerusakan ekosistem laut hal ini dilakukan melalui pengawasan wilayah laut terhadap alat tangkap perikanan yang dinilai tidak ramah lingkungan. Peran dari PSDKP ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang izin usaha perikanan. Qanun tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya ikan yang dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengupayaan dan perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

4.5.3.2. Akademisi

Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau Pulau Kecil Terluar wilayah Sabang relative lebih mudah dan menjanjikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah perbatasan lainnya, dilihat dari segi Geografi, Demografi dan kondisi sosial nya. Sabang merupakan wilayah perbatasan barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga yaitu perairan Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah perbatasan Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan dan barat, Selat Malaka di Timur. Dengan posisi geografis wilayah perbatasan Sabang, banyak obyek wisata di wilayah perbatasan sabang ini, khususnya obyek wisata pantai dan perairan. Dari sisi Demografi masyarakat wilayah perbatasan Sabang relatif lebih maju dan modern dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya yang identik dengan sebutan terisolir, terbelakang, miskin dan serba keterbatasan, pendidikan masyarakat Sabang relatif lebih maju. Sedangkan dari sisi Kondisi sosial wilayah perbatasan Sabang relatif stabil dan aman, baik dari segi politik, ekonomi kehidupan beragama maupun sosial budaya lainnya. Namun ketahanan sosial masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan dari sisi sarana prasarana para nelayan dan petani yang masih sangat sederhana dan tradisional. Sarana prasarana Pangkalan TNI AL perlu ditingkatkan, seperti banyaknya Gedung gedung yang rusak dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) belum berfungsi secara optimal yang nantinya dapat membantu pembinaan wilayah perbatasan Indonesia barat, khususnya wilayah Sabang dan pulau pulau sekitarnya.

Jika dilihat dari indikator SDM dan Sarpras yang ada dalam kegiatan pembinaan wilayah perbatasan laut dan PPKT, upaya untuk meningkatkan indikator tersebut adalah Negara harus hadir di tengah tengah masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan aparat terkait hadir dan merangkul semua lapisan masyarakat bersama sama meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembinaan wilayah perbatasan, sehingga dapat mengali sumber daya alam secara maksiamal demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat wilayah perbatasan Sabang.

4.5.3.3 Pengusaha

Masyarakat nelayan di sekitar Lhok ini sebetulnya memiliki solidaritas yang cukup tinggi, mereka saling bantu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan berat secara bersama-sama, kemudian kesadaran untuk saling membantu sesamanya ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya keterikatan emosioanal dan adanya rasa saling membutuhkan dalam jiwa kenelayanannya. Rasa kebersamaan ini merupakan suatu potensi yang bisa dimanfaatkan dan harus lebih diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup nelayan sehingga alternatif yang diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial nantinya akan lebih terarah dan dapat memberikan ketentraman sehingga adanya konflik-konflik antar nelayan tidak terulang lagi. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal sebagai lapangan kerja tambahan disamping menambah penghasilan mereka juga dapat memunculkan kreatifitas mereka seperti variasi penyajian kopi khas Aceh dan makanan khas di daerah ini seperti sate gurita. Ajang berkumpulnya masyarakat nelayan selama ini dinilai sangat positif mereka bisa bertukar informasi sesama nelayan dalam suasana yang akrab dan kekeluargaan.

Adanya pelatihan pembuatan olahan ikan kepada masyarakat sekitar termasuk istri para nelayan yang dimaksudkan untuk memotivasi

dan menginspirasi masyarakat untuk terus maju dan berkarya, hal ini tentunya akan sangat bermanfaat jika dihadapkan pada ketergantungan masyarakat pesisir terhadap aktifitas melaut dan mencari ikan jika sewaktu waktu kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut maka salah satu alternatif yaitu membuka usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

4.6 Pembahasan

Resiliensi merupakan kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan serta diperkuat atau ditransformasikan oleh kesulitan-kesulitan dalam hidup. (Grotberg, 1995). Jika dikaitkan dengan ketahanan sosial yang merupakan suatu kemampuan untuk mendorong keterlibatan dan mempertahankan hubungan positif dan untuk bertahan dan pulih dari stres kehidupan dan isolasi sosial yang menekankan kapasitas individu untuk bekerja dengan orang lain untuk mengubah kesulitan menjadi keuntungan.(Nuryana,2002). Dalam menilai Ketahanan masyarakat terdapat Tiga Kapasitas Ketahanan sosial yang dikemukakan Keck dan Sakdapolrak (2013) adalah sebagai berikut; *Coping capacities*, yaitu kemampuan aktor sosial untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam masalah; *Adaptive capacities*, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan masa depan dalam kehidupan sehari-hari; *Transformative capacities*, yaitu kemampuan untuk merangkai lembaga yang mendorong kesejahteraan individu dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan terhadap krisis di masa depan.

Ketahanan Sosial Masyarakat telah menjadi isu kritis di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kecenderungan meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat, isu ini tidak saja berpangkal dari makin pudarnya nilai kesetiakawanan sosial yang ditandai dengan merebaknya konflik sosial di berbagai daerah, tetapi juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya

termasuk rentannya kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh eksternal serta kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai perlawanan terhadap penetrasi budaya asing yang menghancurkan keunikan lokalnya. Kerapuhan ini juga ditandai oleh tumbuhnya berbagai gerakan sosial masyarakat lokal yang mengarah pada gejala disintegrasi.

Dihadapkan pada realita bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan ketentuan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Terkait dengan pulau-pulau kecil terluar, situasi yang dilihat adalah isu perbatasan antarnegara. Keberadaan 92 pulau-pulau kecil terluar yang 12 diantaranya adalah kawasan prioritas pengelolaan kedaulatan NKRI. Posisi Indonesia yang rawan konflik di Kawasan Asia Pasifik, sehingga perlu mengoptimalkan pertahanan di pulau-pulau kecil terluar tersebut. Pembangunan postur pertahanan di pulau-pulau kecil terluar dan aktif dalam forum internasional, menjadi hal yang penting untuk membawa isu serta predikat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Menurut Hayati dan Yani, bahwa secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara) (Ahmad, 2007). Posisi perbatasan wilayah negara yang begitu strategis tersebut dipertegas oleh Starke, bahwa perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. (Starke, 1972).

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebenarnya menjadi tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BNPP beranggotakan 19 Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kemenkopolhukam, KKP, Kemendagri, Kemehnan, Kemenlu, Kemenhub, Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenkes, Kemendiknas, Kemekeu Kemenkumham, Kemenhut, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemen PDT, Sekretaris Kabinet, TNI, POLRI, BIN. Wilayah perbatasan Indonesia berbatasan laut, dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. (UU No.43/2008).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla). Penyelenggaraan Dawilhanla adalah kegiatan pengelolaan potensi sumber daya nasional menjadi potensi pertahanan laut untuk kepentingan pertahanan negara. Staf Umum Potensi Maritim TNI Angkatan Laut (Spotmar TNI AL), organisasi yang dibentuk tanggal 9 September 2016 merupakan Staf Umum pembantu pimpinan di tingkat Markas Besar Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal. Spotmar bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Laut di bidang Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar). (Perkasal, 2016).

Berkaitan dengan penelitian yang dibahas, pengelolaan perbatasan dalam hal ini diarahkan kepada adanya permasalahan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang yang telah dijelaskan sebelumnya dan kerjasama yang dilakukan sebagai solusi atau upaya membangun konsep untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan dilakukan dengan konsep *Triplehelix*. Konsep *Triplehelix* merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari tiga aktor yaitu akademik, Bisnis dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis

pengetahuan. Dalam kontribusinya Peneliti akan membahas tentang Implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang. Yang telah disebutkan diatas. Dari hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka berikut ini Peneliti akan membahas lebih dalam tentang implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

4.6.1 Kondisi ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang saat ini

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang dikategorikan kurang hal ini dilihat dari beberapa indikator yaitu kemampuan mengatasi gangguan, kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk bertransformasi, dilihat dari sikap para nelayan yang cenderung memilih untuk berdiam diri dirumah menunggu cuaca membaik ketika terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk melaut, namun ada juga yang memilih untuk tetap melaut meskipun cuaca sedang tidak bersahabat dengan mencari celah lokasi yang tenang gelombang lautnya namun kecenderungan nelayan untuk memilih untuk berdiam diri dirumah menunggu cuaca membaik hal ini dikarenakan nelayan hanya bergantung kepada hasil melaut sebagai sumber mata pencaharian utama mereka.

Demikian juga dengan permasalahan penyelundupan narkoba yang disinyalir ada keterlibatan nelayan dalam beberapa aksi kejahatan di laut, juga tertangkapnya nelayan lokal di malaysia, Thailand dan India juga adanya konflik antar nelayan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Meskipun dalam hal kemampuan bertransformasi atau bekerjasama nelayan dengan pemerintah menunjukkan hal yang positif dengan adanya saling koordinasi dan bantuan dari pemerintah yang berupa alat tangkap tradisional namun secara keseluruhan belum mampu mengakomodir kebutuhan nelayan. Hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman

masyarakat bahwa tentang kreatifitas mengembangkan potensi sumber daya yang ada sehingga nantinya dapat menghasilkan penghasilan tambahan diluar penghasilan sebagai nelayan selain itu, kurang adanya pemahaman masyarakat tentang persepsi batas wilayah tangkap serta ada ego sektoral yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya perikanan sehingga terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan dengan merusak ekosistem laut dan terumbu karang sebagai sarana perkembangbiakan ikan.

Kemampuan menyesuaikan diri dalam ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang bahwa masyarakat nelayan kurang memiliki kemampuan dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa wilayah Sabang banyak terjadi permasalahan keamanan maritim seperti yang terbaca pada peta kerawanan Lanal Sabang yaitu adanya perubahan cuaca, imigran gelap, illegal fishing, konflik antar nelayan dan penyelundupan narkoba, hal ini terbukti dari respon masyarakat yang cenderung mengeluhkan kondisi yang kurang bersahabat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan sosial yang terjadi dalam masyarakat nelayan di wilayah Perbatasan Sabang.

Menyesuaikan diri berkaitan erat dengan bagaimana seorang individu ini mampu untuk menghadapi berbagai kondisi yang timbul dari lingkungan. Menurut Gunarsa (2004,p 95) bahwa penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia sehingga penyesuaian diri dalam hidup harus dilakukan supaya terjadi keseimbangan dan tidak ada tekanan yang dapat mengganggu suatu dimensi kehidupan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Asrori (2011,p175) mengatakan bahwa penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustrasi, konflik serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan

antara tuntutan diri dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada.

Jika dikaitkan dengan kemampuan menyesuaikan diri dalam konteks ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang ini Peneliti menyimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri masyarakat nelayan di wilayah perbatasan Sabang, dimana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru mereka untuk berubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang seringkali terjadi dan suatu saat dimungkinkan akan terus terjadi dan kemudian menghadapi segala keadaan yang tidak diharapkan oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan hubungan yang dinamis dengan orang lain dan juga lingkungan sekitar.

Terkait dengan kemampuan menyesuaikan diri masyarakat di wilayah perbatasan, dari hasil wawancara peneliti berargumentasi bahwa individu masih enggan untuk melakukan perubahan dalam dirinya mengingat kondisi lingkungan yang tidak kondusif rentan akan perubahan iklim, konflik sosial dan permasalahan khas wilayah perbatasan negara yang rawan akan tindakan penyelundupan narkoba, masuknya imigran gelap, illegal fishing maupun destructive fishing sehingga kurang tercipta hubungan yang dinamis antar individu dalam komunitas nelayan tersebut demikian juga hubungan dengan lingkungan dimana mereka berada.

Ketahanan bisa juga didefinisikan sebagai kesanggupan (*ability*) mengantisipasi, mempersiapkan (*plan*), dan beradaptasi (*adaptive*) dengan perubahan kondisi, kemudian bertahan, merespons, serta pulih kembali (*recovery*) akibat disrupsi (*disrupt*). Disrupsi lebih dialamatkan kepada gangguan berat (*shock, trauma*), bencana yang luar biasa (katastropik) bencana alam, pandemik, terorisme, dll. Ketahanan sebagai kapasitas manusia dan komunitasnya menghadapi goncangan (*shock*) dan tekanan (*stress*) dan mengait dengan upaya merespons dalam persiapannya, saat kejadian, dan pasca pemulihan kembali sampai hidup normal bahkan lebih baik lagi (*adaptasi*). (Alan H Kwok, 2016). Kemudian ketahanan sosial diartikan sebagai kemampuan kelompok atau masyarakat untuk dapat

menahan gangguan dari luar atau perubahan perubahan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang dapat merubah tatanan masyarakat atau struktur sosial. (Adger, 2000). Jika dikaitkan dengan nelayan tradisional yang merupakan salah satu kelompok masyarakat atau komunitas yang rawan terhadap berbagai gangguan dimana nelayan kecil tradisional ini umumnya tinggal di wilayah pesisir karena itu ketika terjadi perubahan cuaca ataupun tindak kejahatan di laut maka komunitas nelayan kecil ini merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korbannya, apalagi jika dihadapkan dengan adanya kondisi cuaca yang sulit untuk di prediksi. Untuk itu dibutuhkan kehadiran aktor-aktor dalam membantu mengatasi dan mengelola wilayah perbatasan termasuk unsur masyarakatnya.

Jurnal Penelitian terdahulu tentang Resiliensi Sosial Dari Perspektif Sosiologi: Konsep Dan Aplikasinya Pada Komunitas Nelayan Kecil tahun 2019 oleh Rilus A. Kinseng menyatakan bahwa kemampuan suatu entitas sosial untuk mempertahankan kohesi dan integrasi sosialnya. Oleh sebab itu, dari perspektif sosiologi, resiliensi sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan keutuhan atau integrasi sosialnya, pada saat dan/atau setelah mendapat gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Nelayan kecil di Lampon telah mengalami berbagai gangguan, baik terhadap mata pencaharian maupun kehidupan mereka secara keseluruhan. Gangguan tersebut ada yang berasal dari luar (eksternal), seperti kondisi cuaca (perubahan iklim), kebijakan Pemerintah, hingga bencana alam tsunami. Namun demikian, ada juga yang berasal dari dalam, yaitu hubungan patron-klien yang menyebabkan harga jual ikan nelayan menjadi rendah.

Jurnal Penelitian terdahulu yang juga terkait tentang Ketahanan Sosial di Perbatasan Sebatik tahun 2016 oleh Fakhry Ghafur menyatakan bahwa terdapat dua langkah yang dapat dijadikan solusi pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik, antara lain pemberdayaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan optimalisasi kerjasama lintas batas. Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat dilakukan dengan

memanfaatkan potensi yang ada, baik berupa sumber daya alam, sosial masyarakat, ekonomi, maupun kelembagaan. Sementara itu, optimalisasi kerjasama lintas batas merupakan salah satu aspek penting yang juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan sosial wilayah perbatasan Sebatik dan perekonomian masyarakat kedua negara dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas. Kedua langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Keck dan Sakdapolrak bahwa diperlukan tiga jenis kapasitas untuk memahami konsep ketahanan sosial (resiliensi sosial) secara utuh [2]. Ketiga jenis kapasitas tersebut adalah “kapasitas untuk mengatasi gangguan” (*coping capacities*), kapasitas beradaptasi (*adaptive capacities*), dan kapasitas berubah atau bertransformasi (*transformative capacities*). Ketiga kapasitas ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai tingkat resiliensi sebuah entitas yang dianalisis, membangun definisi resiliensi social ini dari pengertian kata “sosial” itu sendiri. “sosial” menunjukkan relasi antara individu atau kelompok manusia dengan individu atau kelompok manusia lainnya. Sehingga resiliensi sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan keutuhan atau integrasi sosialnya, pada saat dan/atau setelah mendapat gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Resiliensi sosial itu bersifat relasional karena ia dipengaruhi juga oleh relasi kekuasaan dengan beragam entitas sosial lainnya maupun relasi dengan lingkungan alam.

Selain bahasan diatas Peneliti mempunyai argumentasi sendiri tentang ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan Sabang, maraknya berbagai kasus baik dari internal masyarakat Sabang sendiri maupun masuknya kapal asing melewati perairan Sabang secara ilegal, adanya konflik antar nelayan, keterlibatan nelayan lokal dalam berbagai pelanggaran termasuk tertangkapnya nelayan lokal diluar negeri, hal ini menunjukkan adanya kerentanan sosial yang mengarah kepada

ketahanan Sosial Masyarakat yang rendah, yang ditunjukkan dengan adanya berbagai kecenderungan meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat. Isu ini tidak saja berpangkal dari makin pudarnya nilai kesetiakawanan sosial yang ditandai dengan merebaknya konflik sosial di berbagai daerah, tetapi juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya, termasuk rentannya kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh eksternal. Sehingga ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan Sabang ini masih perlu untuk ditingkatkan.

4.6.2 Implementasi Program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir di Wilayah Perbatasan Sabang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Spotmar dalam meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir khususnya di wilayah perbatasan Sabang belum dapat diimplementasikan dengan baik berdasarkan analisis peneliti dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dimana kendala yang lebih dominan muncul pada faktor sumber daya yaitu SDM dan keterbatasan peralatan/sarana prasarana. Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Widodo (2010:88)

Jika dilihat dari sisi sumber daya manusia, mengingat wilayah perbatasan ini, Lanal Sabang sangat membutuhkan prajurit personel dalam melaksanakan program kegiatan dan didukung oleh kualifikasi personel dibidang potensi maritim, demikian juga dengan personel di jajaran potensi maritim baik di Satkowil maupun Satnonkowil rata-rata terisi 44% dari jumlah Daftar Susunan Personel (DSP), walaupun sudah ada personel yang telah mengikuti kursus ataupun penataran namun jumlahnya belum

signifikan untuk menangani permasalahan di wilayah Sabang mengingat luasnya wilayah kerja Lanal Sabang. Namun demikian kekosongan tersebut dapat teratasi dengan memaksimalkan personel yang ada dan rangkap jabatan dari perwira yang berada pada satker tersebut walaupun belumlah optimal.

Sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungan, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya, sumber daya manusia ini meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu, Hasibuan (2003, h 244). Lebih jelasnya sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan pada pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya sehingga sumber daya manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Gaol (2014:14) manusia merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi. Manusia memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama jalannya suatu organisasi, sumber daya ini dapat dilatih, dikembangkan, dijaga untuk masa depan organisasi bahkan dapat menjadi penentu kelangsungan organisasi tersebut. Tanpa sumber daya manusia semua kegiatan atau rencana yang telah disiapkan oleh organisasi tidak akan bisa berjalan. Dari kedua pendapat tersebut maka jelaslah bahwa faktor sumber daya manusia sangatlah penting dalam suatu organisasi. Secanggih apapun teknologi dan peralatan yang dimiliki tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni maka tujuan organisasi pun tidak akan tercapai. Demikian juga dalam pelaksanaan program kegiatan Spotmar TNI AL dibutuhkan prajurit yang memiliki kualitas dan kuantitas potensi maritim.

Disposisi personal merupakan sesuatu yang dinamis, yaitu memiliki kekuatan motivasi. Motivasi ada dikarenakan kebutuhan dan dorongan dasar. Perilaku dimotivasi oleh dorongan dari *trait*. Manusia adalah makhluk sadar dan rasional, bertingkah laku berdasarkan apa yang diharapkan (Lawrence, 2010 h. 255). Menurut Sumanto Konatif (kemauan) adalah aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan yang menjadi titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah dalam istilah sehari-hari kemauan dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat yang merupakan fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu (Sumanto, 2014).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla). Hakikat pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah, upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut, dan kekuatan pendukungnya secara dini, sesuai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim.

Spotmar TNI AL dengan beberapa program unggulannya yaitu dibidang Pembinaan kemampuan Potensi Maritim (Binpuanpotmar) dengan program penataran kemampuan potensi maritim kepada prajurit TNI AL, kemudian dibidang komunikasi sosial maritim (Komsosmar) dengan program komunikasi sosial dengan komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut, selanjutnya adalah bidang pembinaan ketahanan wilayah maritim (Bintahwilmar), bidang bakti TNI AL dengan program bersih pantai dalam rangka hari dharma samudera, bidang pembinaan wilayah pertahanan laut (Binwiltasla) dengan program peningkatan wawasan kebangsaan di wilayah kerja Lanal Sabang, program ini dimaksudkan guna menyiapkan Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut. (Perkasal, 2016).

Penyiapan ruang, alat dan kondisi (RAK) juang dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim yaitu pembinaan sektor geografi merupakan penyiapan ruang juang untuk kepentingan manuver pasukan dan penyiapan logistik wilayah termasuk di dalamnya ada unsur-unsur operasi seperti KRI, Pesud, Marinir dan Pangkalan serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung Pertahanan Negara. Kemudian yang berkaitan dengan pembinaan pada bidang demografi adalah proses menyiapkan alat juang yang digunakan sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dapat difungsikan untuk membantu Komponen Utama.

Dalam situasi damai pembinaan kondisi sosial merupakan usaha menyiapkan kondisi juang yang ditujukan untuk membantu Pemerintah meningkatkan Ketahanan Wilayah melalui pemberdayaan masyarakat desa pesisir, yang bisa diwujudkan sebagai kekuatan Pertahanan Negara pada masa perang. Dari penjelasan diatas terkait dengan faktor sumber daya manusia dalam hal ini dikategorikan sebagai alat juang baik dari personel prajurit TNI AL maupun masyarakat yang harus ditingkatkan baik dari sisi kualifikasi prajurit TNI AL dibidang potensi maritim dan dari sisi pemberdayaan masyarakatnya.

Dalam konteks penelitian ini adalah membahas tentang Sabang sebagai wilayah perbatasan sebagaimana yang dikemukakan Sianturi (2010) bahwa Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan anantara lain: mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya, yang berbatasan dengan wilayah manapun antar negara dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional

maupun nasional. Sebagai makna perbatasan yaitu sebagai daerah atau jalur pemisah Antara unit-unit politik (Negara), maka perbatasan negara mengandung komponen paling sedikit dua negara yang berbatasan dengan demikian juga dari komponen rakyat dari Negara yang berbatasan.

Dari berbagai studi seperti Bappenas 2004 dan studi Lemhanas 2004 serta LIPI, menunjukkan bahwa isu atau masalah perbatasan sangat kompleks. Hal ini terkait dengan Sabang sebagai wilayah yang berbatasan dengan tiga negara sekaligus yaitu Malaysia, Thailand dan India di Kepulauan Nikobar tentunya sangat memungkinkan terjadinya permasalahan keamanan maritim yang harus menjadi prioritas dalam penanganannya.

Dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan, salah satu program Spotmar TNI AL yaitu Pembinaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Binwiltasla) melalui peningkatan ketahanan masyarakat. Program ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, baik secara berdiri sendiri atau bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya, untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan laut yang meliputi; wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas TNI Angkatan Laut (Jukgar Binwiltasla, 2021).

Demikian juga dengan program kegiatan yang dilaksanakan di Lanal Sabang sebagai pelaksana program di bidang potensi maritim yaitu; melaksanakan Pembinaan Kemampuan Potensi Maritim melalui Penataran Kemampuan Potensi Maritim Tersebar di tingkat Lanal, Komunikasi Sosial Maritim melalui kegiatan komunikasi dengan komponen masyarakat, Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim dengan melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kampung Bahari Nusantara, Bakti TNI AL dengan melaksanakan kegiatan bersih pantai bersama masyarakat sekitar dan aparat pemerintah kota Sabang, Pembinaan wilayah

perbatasan laut dan PPKT dengan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bersama siswa siswi setingkat SMU di wilayah Kota Sabang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber juga mengatakan bahwa program kerja kegiatan pembinaan potensi maritim dengan *locus* di wilayah perbatasan Laut dan Pulau-pulau kecil terluar. Kemudian pimpinan TNI AL juga memiliki program untuk mengembangkan program Kampung Bahari Nusantara di setiap Satkowil dan Satnonkowil. Kampung Bahari Nusantara (KBN) ini dibangun dengan lima bidang kluster, yaitu Kluster pariwisata, kluster kesehatan, kluster pendidikan, kluster ekonomi dan kluster pertahanan. Kelima bidang kluster yang akan dikembangkan tersebut nantinya akan bersinergi dengan Instansi terkait di Pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan KBN ini menjadi program nasional dan diharapkan menjadi proyek percontohan bagi kampung-kampung di wilayah lainnya. Kegiatan pembinaan Potensi Maritim yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Satkowil dan Satnonkowil. Kegiatan pengawasan dan evaluasi, ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya serta sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Dihadapkan pada tuntutan kegiatan dalam bidang potensi maritim di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kerja Lanal Sabang tentunya membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kendala kedua dalam implementasi program Spotmar ini terletak pada keterbatasan sarana prasarana yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana prasarana diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, media dan alat. Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses atau kegiatan. Sedangkan menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disampaikan bahwa Sarana dan prasarana yaitu sesuatu yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan, meliputi; gedung,

tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dari pendapat beberapa ahli diatas bahwa sarana dan prasarana ini penting guna mendukung keberhasilan suatu program kegiatan.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Lanal Sabang sebagai sebagaimana data yang dihimpun peneliti, bahwa terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan Seperti halnya Lanal Sabang yang memiliki Alutsista terbatas, yang ditempatkan di Posal-Posal yang ada yaitu Legend AIS, Radar, LRC, PAT I 1-32, *Rubber Boad*, *Spped Fiberglass*, dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dihadapkan juga dengan kondisi luasnya wilayah kerja Lanal Sabang dengan unsur Jenis KAL dan Sea Rider yang dimiliki Lanal Sabang dinilai kurang memadai dengan kondisi siap terbatas. Hal ini masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan, sarana serta prasarana dihadapkan dengan panjang garis batas yang harus diawasi, inilah yang nantinya turut memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti halnya yang terjadi di wilayah Sabang.

4.6.3 Konsep Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir di Wilayah Perbatasan Sabang

Pada umumnya, wilayah pesisir memiliki beberapa potensi dalam bidang perikanan dan kelautan, perdagangan, wisata bahari, serta industri kelautan (Apriliani, 2014). Untuk mengelola sumberdaya kelautan secara sustainable, ekonomi biru menjadi alternative yang menarik untuk menjembatani permasalahan lingkungan dan kepentingan ekonomi yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Demikian halnya dengan Sabang memiliki potensi perikanan demersal seperti kerapu, kakap, dan gurita. Ikan demersal merupakan ikan-ikan yang biasanya hidup di zona demersal, seperti dasar laut atau danau. Ikan ini merupakan ikan ekonomis

penting yang ada di Kota Sabang dan Aceh. Bahkan gurita menjadi salah satu komoditi ekspor yang paling diminati, biasanya dikirim Aceh ke Eropa, China, dan negara-negara lainnya. Di Sabang, gurita bahkan menjadi salah satu kuliner khas yang biasanya dikemas dalam bentuk sate gurita. Sabang juga memiliki potensi ekonomi sumber daya dan jasa kelautan lainnya, seperti energi dan mineral laut, perikanan, wisata bahari, serta transportasi dan industri maritim lainnya.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji secara mendalam tentang perkembangan konsep *helix* dalam sebagai konsep dalam percepatan peningkatan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan. Pemahaman konsep ini dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan inovasi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang melibatkan aktor-aktor dalam model *helix* ini beserta peran dari masing-masing aktornya.

Sebagaimana yang dimukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) mengembangkan model *triplehelix* yang mengadopsi model inovasi spiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (pemerintah, swasta dan akademis) pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione, 1998). Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen pengetahuan utama; li) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di pasaran; Dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi (Arnkil et al., 2010). Model *Triplehelix* menyiratkan kompleksitas yang meningkat dalam hal elemen operasional utama, atau komponen, dan hubungan di antara elemen-elemen ini dengan mempertimbangkan fungsinya. Dalam meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang ini, peneliti akan menggunakan media *helix* yang menekankan pada peran serta masyarakat

Sabang dalam proses inovasi, membangun konsep sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah ditunjang dengan modal informasi, komunikasi dan jejaring sosial.

Jurnal Penelitian terdahulu yang terkait tentang *Social and economic resilience in the Bothnian Arc Cross Border Region* tahun 2019 oleh Giacometti. Kondisi sepanjang wilayah pesisir yang menunjukkan beberapa tantangan dan risiko lokal di Arc Bothnian, tetapi yang paling penting menunjukkan beberapa ancaman global yang rentan terhadap semua kawasan, tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya kesadaran tren global dalam hal teknologi, politik dan iklim, untuk beradaptasi dengan perubahan dan membentuk jalur pembangunan kawasan yang sesuai serta adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan akademik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa kawasan pesisir di perbatasan negara dalam kondisi rentan akibat ancaman global sehingga diperlukan teknologi, politik untuk beradaptasi dengan perubahan dan yang tidak kalah penting adalah terbangunnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan akademik yang juga digunakan dalam penelitian ini.

Terkait dengan media *helix* yang telah dijelaskan diatas, hasil pengamatan selama penelitian, peneliti berargumentasi bahwa ketiga aktor dalam *triplehelix* (pemerintah, akademisi dan pengusaha) yang ada di wilayah perbatasan Sabang sudah berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat namun belum tersinegi antara aktor satu dengan aktor lainnya, upaya pemerintah daerah dengan berbagai macam program yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Peran pemerintah dalam kerjasama triplehelix ini adalah sebagai lembaga yang memiliki otoritas membuat dan menerapkan kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk melaksanakan program dalam rangka mendorong kesejahteraan rakyat,

salah satunya adalah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo dengan Konsep ekonomi biru yang ditawarkan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan pariwisata bahari dan pesisir. Dalam upaya memberikan kontribusi dalam menjadikan pencapaian ekonomi kelautan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

Keterlibatan Spotmar TNI AL maupun Lanal Sabang sebagai komponen pemerintah dalam kegiatan pembinaan potensi maritim yaitu dengan melaksanakan program selama kurun waktu 2018-2021 di wilayah perbatasan Sabang antara lain; Pembinaan Kemampuan Potensi Maritim melalui Penataran Kemampuan Potensi Maritim Tersebar di tingkat Lanal, Komunikasi Sosial Maritim melalui kegiatan komunikasi dengan komponen masyarakat, Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim dengan melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kampung Bahari Nusantara, Bakti TNI AL dengan melaksanakan kegiatan bersih pantai bersama masyarakat sekitar dan aparat pemerintah kota Sabang, Pembinaan wilayah perbatasan laut dengan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bersama siswa siswi setingkat SMU di wilayah Kota Sabang dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di wilayah kerja Lanal.

Dari sisi pengusaha, peran pengusaha yang merupakan aktor utama sebagai entitas organisasi yang didirikan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyediakan produk. Dalam hal ini pengusaha yang dimaksud adalah industri pengolahan ikan laut yang telah berhasil mengembangkan usahanya kemudian juga berkontribusi bagi upaya mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, dengan melaksanakan pelatihan pembuatan olahan ikan kepada masyarakat sekitar termasuk istri para nelayan, hal ini dimaksudkan untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk terus maju dan berkarya, yang diperkuat dengan

kesediaan pengusaha untuk berbagi ilmu dan keterampilan yang dimiliki dengan mengadakan pelatihan pembuatan olahan ikan kepada istri-istri nelayan, diharapkan dapat mengikuti keberhasilan mereka dan menjadikan lapangan pekerjaan baru sebagai alternatif pekerjaan selain menangkap ikan, namun adanya berbagai kendala khususnya dari sisi permodalan sehingga upaya ini belum membuahkan hasil.

Demikian juga dengan keterlibatan para akademisi, peran akademisi yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas ide ilmu pengetahuan maupun teknologi bagi tumbuhnya industri kreatif. Dengan adanya sumbangsih ide dan pemikirannya melalui berbagai penelitian, ini mengarah kepada lahirnya inovasi yang dapat memperkuat industri baik formal maupun informal yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kegiatan mereka melalui pendampingan secara terus menerus sehingga menghasilkan industri kreatif, dalam hal ini dimaksudkan agar masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang ini memiliki penghasilan lain selain menangkap ikan dan tidak menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut mengingat cuaca di wilayah ini sulit untuk di prediksi.

Dari penjelasan ini maka diperlukan penguatan sinergitas antara ketiga aktor terkait yaitu pemerintah, akademisi dan pengusaha (model *triplehelix*), selain itu peneliti juga membuat suatu konsep yaitu forum komunikasi. Komunikasi merupakan hal penting dalam organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan meningkatkan kreatifitas dan kinerja suatu organisasi dengan adanya komunikasi dua arah. Demikian juga dengan permasalahan ketahanan sosial masyarakat di wilayah pesisir Sabang yang dinilai kurang dan perlu untuk ditingkatkan sehingga diperlukan forum komunikasi yang mewadahi komunikasi antara ketiga aktor tersebut, untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi.

Dalam hal ini forum komunikasi dikoordinir oleh Spotmar TNI AL yang bertujuan agar program Spotmar TNI AL yang dilaksanakan selama ini dapat terimplementasikan dengan baik sehingga apa menjadi upaya

dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir Sabang dapat terwujud. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97)

Spotmar TNI AL menangani beberapa bidang seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana tugas Spotmar TNI AL bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Laut di bidang Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan potensi maritim, pembinaan ketahanan wilayah maritim, pembinaan komunikasi sosial maritim, pembinaan bakti TNI Angkatan Laut dan pembinaan perbatasan laut/pulau pulau kecil terluar dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) guna menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.(Perkasal, 2016).

Salah satu tugas Spotmar TNI AL yaitu melaksanakan Komunikasi Sosial Maritim (Komsosmar) yang memiliki peran untuk membangun kedekatan, mengetahui permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna meningkatkan kesadaran bela Negara, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan. Komponen Komunikasi Sosial Maritim yang dimaksud dengan komponen bangsa adalah objek Komsosmar dengan komponen pemerintah, komponen masyarakat, komponen Keluarga Besar TNI AL (KBT), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Komponen Pemerintah (Kompem) yaitu Komsosmar yang akan dilaksanakan oleh satuan TNI Angkatan Laut dengan pemerintah tingkat pusat/daerah, lembaga negara, Kementerian/LPNK.
- b. Komponen Masyarakat (Kommas) yaitu Komsosmar yang akan dilaksanakan oleh Satuan TNI Angkatan Laut dengan komponen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama,

tokoh adat, mahasiswa, pelajar, ormas dan LSM), mitra TNI Angkatan Laut.

- c. Komponen Keluarga Besar TNI Angkatan Laut (KBT). Komsosmar yang akan dilaksanakan oleh satuan TNI Angkatan Laut dengan Komponen KBT (Jalasenastri, Aparatur Sipil Negara TNI Angkatan Laut, FKPP, Saka Bahari dan PPAL).

Terkait dengan penjelasan diatas maka, forum komunikasi yang akan diterapkan sebagai upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang dikoordinir oleh Spotmar TNI AL sesuai tugasnya pada bidang Komsosmar yang diharapkan mampu melaksanakan komunikasi dengan komponen pemerintah, komponen masyarakat, komponen Keluarga Besar TNI AL (KBT) guna lebih mengintensifkan kerjasama dengan aktor terkait dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang.